

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA
DAERAH DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN ENREKANG
(ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)**



OLEH

**SARAH
NIM: 18.2900.005**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN
PAREPARE**

2022

**EFEKTIVITAS PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA
DAERAH DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN ENREKANG
(ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)**



OLEH

**SARAH
NIM: 18.2900.005**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN
PAREPARE**

2022

**EFEKTIVITAS PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA
DAERAH DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN ENREKANG
(ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi**

Program Studi

Manajemen Keuangan Syariah

Disusun dan diajukan oleh:

**SARAH
NIM: 18.2900.005**

Kepada

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Penyusunan Anggaran Belanja Daerah di
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Enrekang (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)

Nama Mahasiswa : Sarah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2900.005

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

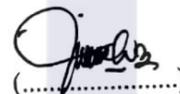
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

B.3352/In.39.8/PP.00.9/9/2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.



Nip : 19611231 199803 2 012

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E.,M.M.



Nip : 19760604 200604 2 001

Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Penyusunan Anggaran Belanja Daerah di
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Enrekang (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)
Nama Mahasiswa : Sarah
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2900.005
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
B.3352/In.39.8/PP.00.9/9/2021
Tanggal Kelulusan : 28 November 2022

Disetujui Oleh Komisi Penguji :

Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. (Ketua)
Dr. Damirah, S.E., M.M. (Sekertaris)
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Anggota)
Dr. Usman, M.Ag. (Anggota)



Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula kita kirimkan shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai Nabi pembawa petunjuk keselamatan dunia dan akhirat.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Jumadi, Ibu Tia serta saudari Rahma dan Ulfa karena selalu memberikan motivasi, baik dukungan secara fisik ataupun material. Sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik. Tanpa mereka, penulis tidak bisa sampai sekarang ini.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Ibu Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. selaku Pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya untuk penyelesaian studi dan penulis mengucapkan banyak terima kasih juga kepada ibu Dr. Damirah, S.E.,M.M. selaku Pembimbing II atas segala bantuan, bimbingan serta arahan yang telah diberikan selama penulisan skripsi.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimah kasih banyak yang setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Nurfadhillah, M.M sebagai “Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah” atas segala arahan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik
4. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. Selaku Penasehat Akademik atas arahan dan bimbingan kepada penulis selama kuliah di IAIN Parepare
5. Bapak dan ibu dosen seluruh program studi yang selama ini mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya
6. Bapak dan ibu staff dan admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberi support kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kepala akademik dan perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare
8. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Enrekang beserta jajarannya yang telah memberikan izin, informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian skripsi ini
9. Sahabat-sahabat seperjuangan Radiatullah, Misna, Ibad, Rahma, Alda, Hasria dan Yuyun yang telah membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan

penulisan skripsi ini. Serta Kak Firdaus yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis.

10. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Manajemen Keuangan Syariah angkatan 2018 yang memotivasi penulis menyelesaikan skripsi ini. Serta teman-teman KPM Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dan teman-teman PPL Bank Mega Kc Parepare.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah swt. Berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahalanya.

Parepare, 4 November 2022

9 Rabiul Akhir 1444 H

Penulis,



Sarah

NIM. 18.2900.005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SARAH

NIM : 18.2900.005

Tempat/Tgl. Lahir : Dante Malua, 25 Agustus 1999

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Penyusunan Anggaran Belanja Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang (Analisis Manajemen Keuangan Syariah).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesabaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 4 November 2022

Penyusun,



Sarah

NIM: 18.2900.005

ABSTRAK

Sarah. *Efektivitas Penyusunan Anggaran Belanja Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)*. (dibimbing oleh Marhani dan Damirah).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Enrekang merupakan kelembagaan daerah yang mendapat amanat atau mandat untuk melaksanakan fungsi koordinator perencanaan pembangunan dalam lingkup organisasi pemerintah. Setiap tahun pemerintah daerah mempersiapkan perencanaan atau penyusunan anggaran dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah. Karena anggaran pemerintah terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan kegiatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penyusunan anggaran belanja daerah di BAPPEDA Kabupaten Enrekang dan mengetahui efektivitas penyusunan anggaran belanja daerah di Kabupaten Enrekang

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, data dalam penelitian ini, diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun uji keabsahan data yang dipakai yaitu uji kredibilitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) sistem penyusunan anggaran belanja daerah di BAPPEDA Kabupaten Enrekang yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu Renstra (Rencana Strategi), Renja (Rencana Kerja), RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2) Dan dalam efektivitas penyusunan anggaran belanja daerah di BAPPEDA Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan manajemen keuangan syariah yang dimana telah menerapkan atau telah menggunakan Prinsip Menegakkan keadilan, Prinsip Amanah dan Bertanggung Jawab serta Prinsip Komunikatif.

Kata kunci: Efektivitas, Penyusunan Anggaran, Manajemen Keuangan Syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	11
C. Kerangka Konseptual	25
D. Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
1. Pendekatan Penelitian.....	30

2. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
1. Lokasi Penelitian	31
2. Waktu penelitian.....	31
C. Fokus Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	31
1. Jenis Data.....	31
2. Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	32
1. Metode Observasi	32
2. Metode Wawancara (<i>interview</i>)	33
3. Metode Dokumentasi.....	33
F. Uji Keabsahan Data	33
G. Teknik Analisis Data	36
1. Reduksi Data	37
2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	37
3. Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusion</i>).....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Sistem Penyusunan Anggaran Belanja Daerah di BAPPEDA Kabupaten Enrekang	39
B. Efektivitas Penyusunan Anggaran Belanja Daerah di BAPPEDA Kabupaten Enrekang berdasarkan Manajemen Keuangan Syariah.....	49
BAB V PENUTUP	69
A. SIMPULAN.....	69
B. SARAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangda Kab. Enrekang	52
4.2	Tabel Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan	54
4.3	Tabel Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran	58
4.4	Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda-litbang Kabupaten Enrekang	60
4.5	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.	66

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	29
4.1	Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD	42
4.2	Keterkaitan antara Renja-OPD dengan Dokumen Perencanaan dan penganggaran lainnya.	46
4.3	Gambar Rumusan Rencana Program Kegiatan BAPPEDA-LITBANG tahun 2020 dan perkiraan maju tahun 2021	47



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	V
2.	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	VII
3.	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	VIII
4.	Surat Selesai Meneliti	IX
5.	Surat Keterangan Wawancara	X
6.	Dokumentasi	XVI
7.	Riwayat Hidup	XIX

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات	: māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُّوْا	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
-----------	---------------------------------------

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

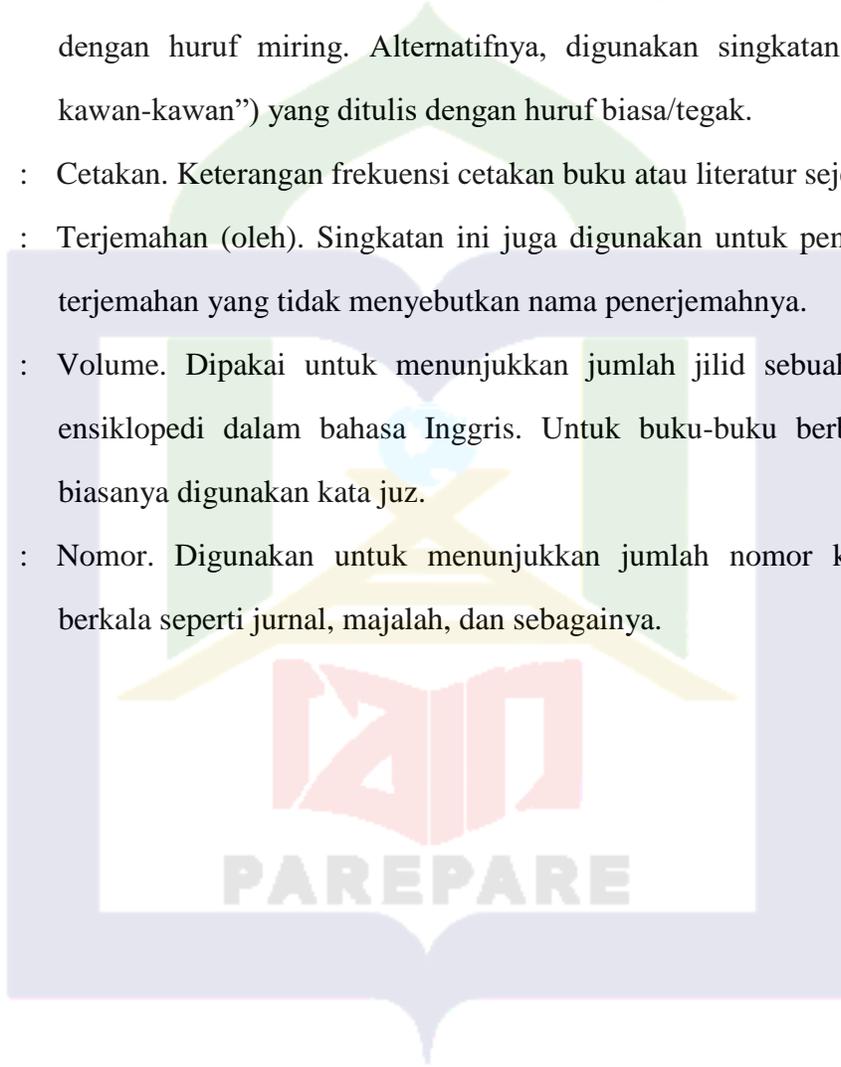
swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menyangkut tentang belanja daerah, yang merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih selama periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kemudian akan ditampilkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Padahal, belanja merupakan komponen penting dalam sistem APBD, tidak terlepas dari porsi pendapatan dan keuangan.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi dua tugas pokoknya tersebut antara lain dapat dikaitkan dengan penyelenggaraan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada kepala daerah. Hal ini dilakukan dengan berbagai alasan, antara lain perlunya upaya masyarakat dalam memberikan pelayanan kebutuhan dasar dan pembangunan.

Pemerintah daerah dilaksanakan, dan perangkat daerah, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, membantu kepala daerah (BAPPEDA). Dalam konteks organisasi pemerintahan Kabupaten Enrekang, BAPPEDA Kabupaten Enrekang merupakan lembaga daerah yang diberi mandat atau wajib untuk melaksanakan tugas koordinator perencanaan pembangunan.

BAPPEDA Kabupaten Enrekang merupakan salah satu unsur penunjang pemerintahan Kabupaten Enrekang. BAPPEDA adalah Organisasi teknis daerah yang melakukan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Direktornya yang bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/ Walikota melalui sekretariat daerah. Tanggung jawab utama organisasi ini adalah mendukung Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah penelitian perencanaan pembangunan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah¹, yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Per.Mendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, menandai pembaruan hingga pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, daerah memiliki dampak yang cukup besar bagi pemerintah daerah.²

Penggunaan anggaran dan pendapatan kota merupakan bagian integral dari operasi pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah yang sama secara konsisten membuat perencanaan anggaran, yang juga dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Karena anggaran pemerintah terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran merupakan alat perencanaan untuk tujuan pemerintah serta mekanisme untuk mengelola distribusi sumber dana publik yang telah disetujui oleh

¹ Republik Indonesia, *Pemerintah Dalam Negeri No. 58 Tahun 2005*.

² Republik Indonesia, *Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006*.

legislatif untuk digunakan dimasa depan³. Adapun berikut ini tabel anggaran APBD Kabupaten Enrekang dari tiga tahun terakhir.

Tahun	Anggaran	Realisasi (%)
2019	1.095,92 M	97,15%
2020	1.239.751,05 M	89,98%
2021	1.155.600,89 M	100,3%

Sumber: Dokumen APBD Kabupaten Enrekang tahun 2019-2021

Umumnya, di dalam organisasi sektor publik akan terlihat baik apabila organisasi yang bersangkutan mampu dalam melaksanakan tanggung jawab dan mencapai tujuannya pada tingkat yang tinggi dengan harga yang wajar. Kebutuhan atau tuntutan baru untuk organisasi sektor publik adalah terus-menerus mempertimbangkan nilai uang. Karena masyarakat selalu berupaya untuk mencapai tujuan sebagai akuntabilitas pelaksanaan *value for money*, khususnya dalam pengadaan dan alokasi sumber daya; efisiensi (efektif) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing cost*); dan menjadi efektif dalam arti mencapai tujuan⁴.

Pentingnya efektivitas pengelolaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah dan seberapa baik pemerintah menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka efektifitas pengelolaan anggaran sangat penting mulai dari perumusan anggaran hingga pelaksanaan hingga pelaporan

³ Uswatun Hasanah, 'Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Litbang Kota Palembang Tahun 2012-2016 Skripsi', 2018.

⁴ Hendrik Manossoh. Melania Rampengan, Grace B. Nangoi, 'Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado', Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16.03 (2016), h.616–23.

atau pertanggungjawaban anggaran. Menerapkan penganggaran berbasis kinerja⁵ adalah salah satu cara untuk mengubah anggaran dalam upaya untuk meningkatkan proses penganggaran.

APBD Kabupaten Enrekang, terkhusus pada badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Enrekang pada dasarnya memuat penyusunan anggaran atau rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama selama satu periode yang mulai terhitung dari 1 Januari sampai 31 Desember. Adapun sesuai dengan pendekatan kinerja yang di terapkan pemerintah, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang dicapai, sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.

Manajemen keuangan syariah, permasalahan utama dalam penyusunan anggaran belanja daerah dikantor BAPPEDA yaitu efektivitas pengelolaan keuangan. Adapun implementasi syariah dalam hal ini yaitu menegakkan keadilan, amanah dan bertanggungjawab serta komunikatif.

Manajemen keuangan syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh atau mendapatkan hasil yang optimal yang bermuara pada keridaan Allah swt. Oleh karena itu, segala langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen harus berdasarkan pada aturan-aturan Allah swt. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Isra/15:26

وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

⁵ Adelstin Tamasoleng, 'Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro', *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, Vol.3 ,No. (2015), h.97-110.

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.⁶

Ruang lingkup manajemen keuangan syariah sesungguhnya sangat luas. Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas yang termasuk kegiatan planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola asset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip syariah. Dengan kata lain manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum islam (*prinsip syariah*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem penyusunan anggaran belanja daerah di BAPPEDA Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana efektivitas penyusunan anggaran belanja daerah di BAPPEDA Kabupaten Enrekang berdasarkan manajemen keuangan syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem penyusunan anggaran belanja daerah di BAPPEDA Kabupaten Enrekang
2. Untuk mengetahui efektivitas penyusunan anggaran belanja di BAPPEDA di Kabupaten Enrekang berdasarkan manajemen keuangan syariah

⁶ *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Toha Putra, 1996).

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas dan tujuan penelitian maka dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagaia bahan referensi untuk menambah pengetahuan oleh mahasiswa IAIN Parepare
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan umum yang menarik dan dapat diambil manfaatnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berikut penelitian relevan yang diteliti terkait dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu;

Melania Rampengan, Grace B. Nangoi, dan Hendrik Manossoh, “Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado”. Hasil dari penelitian ini yaitu, tingkat atau kriteria efektifitas anggaran belanja pada BAPPEDA Kota Manado tahun 2011 – 2015 yang bervariasi.

Tingkat efektifitas tertinggi pada tahun 2015 dan yang terendah terjadi pada tahun 2013. Pada tahun 2011, 2012, 2013 yang dikatakan kurang efektif, tetapi pada tahun 2014 dan 2015 yang cukup efektif. Karena tingkat efektifitas masih kurang efektif dikarenakan realisasi anggaran belanja yang memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai. Walaupun perbedaan ini terjadi karena beberapa kegiatan yang dianggarkan tidak terlaksana, tetapi kegiatan lain yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan dengan cukup efektif oleh BAPPEDA Kota Manado.

Tingkat atau kriteria efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado Tahun 2011 – 2015, secara keseluruhan sudah di olah secara baik. Dimana anggaran belanja tahun 2011, 2012, 2013, dan 2015 yang di

kategorikan sangat efisien dan hanya tahun 2014 dikategorikan efisien. Pengelolaan anggaran belanja ini sudah berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.⁷

Perbedaan penelitiannya yaitu, penelitian terdahulu hanya berfokus terhadap pada analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Sedangkan penelitian peneliti berfokus terhadap efektifitas penyusunan anggaran dan peneliti juga menggunakan analisis Manajemen Keuangan Syariah. Sedangkan persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang tempat atau objeknya yaitu di BAPPEDA.

Jumaroh dan Rr. Retno Sugiharti, “Efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja: studi kasus di BAPPEDA Kabupaten Temanggung”. Hasil dari penelitian ini; Pelaksanaan anggaran pada Bappeda Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dikatakan efektif serta sangat efisien secara keseluruhan. Dimana secara nominal tingkat efektifitas anggaran pada Bappeda Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 sampai tahun 2018 sangat berfluktuasi.

Penelitian terdahulu berfokus pada efektifitas dan efisiensi realisasi anggaran sedangkan yang akan dilakukan penulis itu pada efektifitas penyusunan anggaran.

⁷ Hendrik Manossoh. Melania Rampengan, Grace B. Nangoi, ‘Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado’, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16.03 (2016), h.616–23.

Persamaannya terletak pada efektivitas dan objek yang akan diteliti yaitu kantor Bappeda⁸.

Berta Agus Petra dan Yosi Puspita Sari, “Analisa Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Padang, Jika dibandingkan antara tahun 2018 dan tahun 2019, kinerja Pemerintah Kota Padang pada tahun 2018 lebih bagus dari pada tahun 2019. Ini dapat dilihat dari persentase perbandingan antara anggaran dan realisasi pertahunnya. Dan untuk prediksi tahun 2020 pemerintahan Kota Padang akan mengalami penurunan lagi yang di sebabkan oleh wabah Covid-19.

Peneliti terdahulu terfokus pada pelaksanaan efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada efektivitas penyusunan anggaran belanja daerah di BAPPEDA. Persamaanya sama-sama membahas mengenai efektivitas anggaran belanja daerah.⁹

Adelstin Tamasoleng, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja belum

⁸ Rr Retnosugiharti and Jumaroh, ‘Efektifitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja: Studi Kasus Di BAPPEDA Kabupaten Temanggung’, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar Magelang, 1.1 (2021),h. 55–68.

⁹ Berta Agus Petra and Yosi Puspita Sari, ‘Analisa Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat’, *Jurnal EKOBISTEK*, 10.1 (2021), h.84-88.

dilaksanakan. Dan terdapat beberapa hal yang mempengaruhi yaitu menyangkut Perencanaan Anggaran Renstra SKPD belum sepenuhnya mendukung ketercapaian Visi dan Misi kabupaten, meskipun capaian kinerja dari LAKIP menunjukkan peningkatan.¹⁰

Perbedaan penelitian terdahulu hanya berfokus terhadap Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran. Sedangkan pada penelitian peneliti berfokus terhadap Efektivitas Penyusunan Anggaran dan peneliti juga menggunakan analisis Manajemen Keuangan Syariah. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas mengenai efektivitas pengelolaan anggaran

Ariel Sharon Sumenge, “Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan”. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat dan kriteria efektifitas anggaran belanja BAPPEDA Minahasa Selatan tahun 2008 – 2012 sangat bervariasi.

Tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada 2010 dan yang terendah terjadi pada 2011. Anggaran belanja tahun 2008, 2009, 2010 dan 2012 sudah bisa dikatakan efektif, tetapi pada tahun 2011 tingkat efektifitasnya masih kurang karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai.¹¹

¹⁰ Adelstin Tamasoleng, ‘Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro’, *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, Vol.3 ,No. (2015), h.97-110.

¹¹ Ariel Sharon Sumenge, ‘Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan’, *Jurnal EMBA*, 1.3 (2012), h.74-81.

Perbedaan penelitian ini yaitu, peneliti terdahulu berfokus terhadap tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Sedangkan pada penelitian peneliti, penulis hanya berfokus pada efektivitas penyusunan anggaran dan peneliti juga menggunakan Analisis Manajemen Keuangan Syariah. Adapun persamaannya sama-sama meneliti tentang efektivitas dan anggaran belanja daerah di BAPPEDA.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Dalam Bahasa Inggris adalah *effective* yang berarti berhasil atau tepat¹². Sedangkan definisi secara umum efektivitas merupakan sesuatu yang menunjukkan seberapa jauh tingkat pencapaian suatu tujuan atau suatu target dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, baik itu dari segi kuantitas, kualitas, atau pun dari segi waktu¹³.

Efektivitas menurut Martani dan Lubis adalah unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi dikatakan efektif apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁴

¹² *Kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1976),h.206.

¹³ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2007),h.82.

¹⁴ Martani dan Lubis, *Teori Organisasi* (Bandung: Ghalia Indonesia,1987),h.55.

Efektivitas menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya¹⁵.

Berdasarkan dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu hal yang dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai terjadi sesuai dengan yang diharapkan. Artinya jika suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut mencapai target atau tujuannya.

b. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah merupakan hal yang sangat sederhana karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai macam sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasiakannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antar rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang nyata yang telah diwujudkan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka, hal tersebut dapat dikatakan telah berjalan secara efektif. Hal yang terpenting dalam efektivitas adalah tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

¹⁵Agung Kurniawan, *Transformasi pelayanan public* (Yogyakarta: pembaharuan, 2005),h. 109.

Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan¹⁶.

Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana yang dikemukakan oleh S.P Siagian, yaitu;

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “*pada jalan*” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatangi tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat apabila tidak para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan menacapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian¹⁷.

¹⁶ Ulum. Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik* (Malang :UMM Press,2004),h.294

¹⁷ Sondang P. Siagan, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama)* (Jakarta: Binapura Aksara, 2008),h.77.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang dikemukakan oleh Richard M. Strees dalam bukunya yang berjudul “efektivitas organisasi”, yaitu sebagai berikut;

1. Karakteristik organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Adapun yang dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif tetap sifatnya, seperti yang dijumpai dalam organisasi sehubungan dengan susunan sumber daya manusia, struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan adapun yang dimaksud dengan teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran (*output*).

2. Karakteristik lingkungan

Aspek lingkungan luar dan aspek lingkungan dalam juga telah dinyatakan mempunyai pengaruh terhadap efektivitas kerja. Kedua aspek tersebut sedikit berbeda, namun saling berhubungan. Lingkungan luar yaitu semua kekuatan yang timbul diluar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan dalam organisasi. Sedangkan lingkungan dalam yang pada umumnya disebut iklim organisasi, meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja yang mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas, khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual. Keberhasilan organisasi dengan lingkungan tampaknya amat tergantung pada tingkat variabel kunci yaitu tingkat keterdugaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan dan tingkat rasionalisme organisasi.

3. Karakteristik pekerja

Pada kenyataannya para anggota organisasi merupakan faktor pengaruh yang paling penting karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar tercapainya tujuan organisasi. Pekerja merupakan sumber daya manusia yang langsung berhubungan langsung dengan pengelolaan sumber daya yang ada di dalam organisasi. Oleh karena itu pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pekerja merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pekerja maka semua itu tidak ada gunanya.

4. Kebijaksanaan dan praktek manajemen

Secara umum para pemimpin memainkan peran dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan. Kordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditunjukkan kearah sasaran. Kewajiban mereka para pemimpin untuk

menjamin bahwa struktur organisasi konsisten dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada. Sudah menjadi tanggung jawab dari para pemimpin untuk menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga para pekerja dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil mengejar tujuan dan sasaran organisasi¹⁸.

2. Teori Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Menurut pendapat Munandar Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang.¹⁹

Anggaran (*Budgeting*) merupakan suatu rencana tertulis mengenai kegiatan suatu instansi atau organisasi. Dengan menggunakan anggaran maka perkembangan instansi atau organisasi akan dapat dipelajari dengan teliti dan berkesinambungan. Anggaran dapat berjalan dengan baik apabila dalam organisasi perusahaan atau instansi tersebut ada dukungan aktif, baik dari pelaksanaan tingkat atas maupun tingkat bawah.

Anggaran Pemerintah merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang biasa dikenal dengan sebutan DPRD.²⁰

¹⁸ Strees. M. Richard, *Efektivitas Organisasi*,(Jakarta:Erlangga, 1985),h.9

¹⁹ Elyang Lilly Ibrahim,Muh Nur Abdi, ‘Analisis Perencanaan Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Kantor Badan’, *Ilmu Manajemen*, 4 (2020),h. 26–28.

²⁰ Hendra Karianga, *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*, (Depok: Kencana, 2007), h.47

b. Tujuan Anggaran

1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal, dalam memilih sumber dan investasi dana
2. Memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan yang digunakan
3. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun investasi dana sehingga dapat memudahkan pengawasan.
4. Merasionalkan sumber dana dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
5. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena agar anggaran lebih jelas nyata terlihat atau dikenal dengan istilah transparan.
6. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

c. Tahapan Anggaran

Tahapan anggaran atau sama dengan siklus anggaran menurut pendapat Mardiasmo terbagi menjadi beberapa yaitu sebagai berikut;

1. Tahapan persiapan anggaran (*preparation*)
Dalam tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar pendapatan atas dasar pendapatan yang tersedia
2. Tahap Ratifikasi (*approval/ratification*)
Pada tahap ini melibatkan proses politik. Tahap ini pimpinan harus memiliki managerial *skill* serta *political skill* dan mempunyai kemampuan untuk menjawab dan membeberkan argument rasional atas segala bantahan dari pihak legislatif.
3. Tahap Pelaksanaan Anggaran
Tahap ini memiliki sistem informasi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan bertanggung

jawab untuk menciptakan sistem akuntansi dalam hal pelaksanaan anggaran yang memadai dan handal.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (*reporting dan evaluation*)
Tahap ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Bila pada tahap pelaksanaan telah didukung dengan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan pada tahap ini tidak akan menemui masalah.²¹

d. Karakteristik Anggaran

Menurut Indra Bastian karakteristik anggaran publik terdiri dari;

1. Anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.
2. Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun.
3. Anggaran berisi kesanggupan atau komitmen manajemen untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
4. Usulan anggaran yang telah ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
5. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi atau keadaan tertentu.²²

3. Teori Manajemen Keuangan Syariah

a. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen dalam Bahasa Arab²³ disebut dengan *idarrah*. *Idarrah* diambil dari perkataan *adartasy-syai* atau perkataan *adarta bihi* juga dapat didasarkan pada kata *ad-dauran*. Adapun secara istilah sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu, manajemen (*idarrah*) merupakan aktivitas khusus yang menyangkut kepemimpinan, pengharapan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan

²¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002),h.32

²² Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik*,(Jakarta: Erlangga.2010),h. 191

²³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004),h. 2.

unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Yang bertujuan agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai cara yang efektif dan efisien.

Manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Maka setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme²⁴ sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al- Zalzalah/ 30: 7-8 menyatakan bahwa:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

Terjemahnya:

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”.²⁵

Manajemen Keuangan Syariah menurut Muhammad diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah yang berkaitan dengan masalah perusahaan²⁶.

Manajemen keuangan syariah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip syariah.

²⁴ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 5.

²⁵ *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1996).

²⁶ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2014)

b. Fungsi Manajemen Syariah

Manajemen dalam konteks Islam memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Hal ini telah tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai falsafah hidup manusia.

1. Fungsi Perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang utama, artinya seluruh fungsi sangat bergantung pada perencanaan. Manajer yang membuat perencanaan bisnis dengan baik merupakan sebuah strategi menuju sukses. Proses perencanaan strategis dapat memberikan ide menyeluruh sehingga seorang manajer dapat membuat program kerja jangka panjang untuk menentukan arah pengelolaan masa depan.

2. Fungsi Pengorganisasian

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Pengorganisasian sangatlah penting, bahkan kebatilan dapat mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisasi. Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada cara sebuah pekerjaan dilakukan dengan rapi. Organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja. Dalam sebuah organisasi tentu ada atasan dan bawahan. Pimpinan harus menentukan struktur organisasi yang terbaik untuk menjalankan kegiatan kearah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui struktur organisasi ini dapat ditentukan pembagian tugas yang akan dibuat.

3. Fungsi Kepemimpinan

Ada beberapa istilah yang merujuk pada pengertian kepemimpinan, yaitu *umara* yang disebut juga dengan *ulul amri*. *Ulil amri* atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain.

Pemimpin sering disebut *khadimul ummah* yang berarti pelayan umat. Menurut istilah itu, pemimpin harus menempatkan diri pada posisi pelayan masyarakat.

4. Fungsi Pengawasan

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan/pekerjaan merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan.

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan dan menuntunnya konsisten menjalankan hukum-hukum dan syariat Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan Islam. Sekalipun demikian, Islam belum merumuskan kaidah pengawasan yang baku dan detail serta bentuk-bentuk pengawasan yang wajib dijalankan. Islam memberikan kebebasan setiap individu muslim untuk menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman kondisi sosial atau manajemen yang terdapat dalam masyarakat.²⁷

c. Prinsip-prinsip Manajemen Syariah

Perlu adanya manajemen yang baik dan harus memenuhi syarat-syarat yang tidak boleh atau tidak bisa ditinggalkan dalam menjalankan sebuah pengelolaan agar

²⁷Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 3

diperolehnya hasil yang optimal untuk mencapai keridhaan Allah swt. Berikut beberapa prinsip manajemen syariah diantaranya:

1. Menegakkan Keadilan

Agar tercapainya kesuksesan dalam melaksanakan manajemen maka perlu dilandasi dengan sikap adil karena pada dasarnya Allah swt. Memerintahkan bersikap adil dalam melakukan hal apapun. Setiap perbuatan atau perilaku harus dilakukan dengan adil. Adil dalam hal penyusunan, adil dalam menakar dan menimbang, adil dalam bertindak dan adil dalam menghukum. Keadilan secara garis besar dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak dan hak menikmati pembangunan²⁸. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah/5:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."²⁹

2. Amanah dan bertanggung jawab

Amanat terdiri atas tanggung jawab manusia kepada semua, tanggung jawab kepada tuhan dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Makna dari setiap prinsip tersebut berarti bahwa setiap individu mempunyai kedudukan fungsional dan interaksi antara sesama manusia itu dituntut agar dapat melaksanakan kewajiban dengan sebaik-

²⁸ P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008), h.59.

²⁹ *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Toha Putra, 1996).

baiknya. Individu atau orang yang memiliki sifat amanah akan memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya dan tidak menciderainya. Sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam Q.S Al-Mudassir/74:38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahnya:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”.³⁰

3. Komunikatif

Manajemen komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan transformasi keputusan atau kebijakan dalam rangka pelaksanaan manajerial itu sendiri menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Untuk menjalankan hal tersebut di perlukan kemampuan komunikasi yang baik agar pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dapat mengetahui, memahami dan mengerti bagaimana menjalankannya³¹. Sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:263.

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya, Maha Penyantun”³²

Didin dan Hendri mengatakan tolak ukur manajemen dikatakan telah memenuhi syariah menurut apabila sebagai berikut;

1. Mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan
2. Mementingkan adanya struktur organisasi

³⁰Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya (Semarang: PT. Toha Putra, 1996).

³¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percepatan UPP AMP YKPN,2005), H. 183

³² Al-Qur'an Al-Karim Dan terjemahannya (Semarang:PT. Toha Putra,1996)

3. Membahas soal sistem

Sistem ini disusun agar perilaku pelaku didalamnya berjalan dengan baik. Sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz misalnya, merupakan salah satu yang terbaik. Sistem ini berkaitan dengan perencanaan, organisasi, dan control.³³

d. Tujuan dan sasaran utama Manajemen Syariah

Tujuan dan sasaran utama Manajemen Syariah yaitu memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan akal, keturunan dan harta benda mereka. Adapun secara terperinci tujuan manajemen syariah sebagai berikut;

1. Menerapkan syariat Islam dalam beribadah, muamalat dan hukum.
2. Memakmurkan bumi yang telah diwajibkan Allah kepada hamba-Nya yang menuntut pencurahan upaya materi dan intelektual untuk pemanfaatan daratan dan lautan
3. Menegakkan kekhalifahan di muka bumi yang merefleksikan perangkat hukum pemerintah yang mengatur hubungan di antara anggota masyarakat.
4. Membentuk masyarakat yang dan negara yang adil dan sejahtera, masyarakat yang memiliki ruh untuk beribadah kepada Allah dengan benar.³⁴

³³ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 17.

³⁴ Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h.250

e. Fungsi Manajemen Keuangan Syariah

Fungsi manajemen keuangan syariah menurut Muhammad adalah berkaitan dengan keputusan keuangan yang meliputi fungsi utama yaitu;

1. Keputusan investasi

Keputusan investasi berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana dalam bentuk investasi yang mendatangkan keuntungan dimasa mendatang.

2. Keputusan Pendanaan

Keputusan berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal. Oleh sebab itu, keputusan pendanaan sering disebut kebijakan struktur modal. Dalam hal ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan investasi dan kegiatan usahanya.

3. Keputusan bagi hasil atau deviden

Bagi hasil atau deviden adalah besar kecilnya kemakmuran investor dalam menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, bagi hasil atau deviden merupakan bagian yang sangat diharapkan oleh para investor dan pemegang saham³⁵. Keputusan ini merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan;

- 1) Besarnya presentase laba yang dibagi hasilkan kepada para investor dan pemegang saham

³⁵ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YPKN,2014),h.2

- 2) Stabilitas bagi hasil dan deviden yang dibagikan
- 3) Deviden saham
- 4) Pemecahan saham (*stock split*)
- 5) Penarikan kembali saham yang beredar.

C. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya penegasan istilah dari kata-kata yang digunakan dalam judul penelitian ini.

1. Efektivitas

Menurut H. Emerson, efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya³⁶. Adapun menurut Supriyono, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian saran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.³⁷

Efektivitas menurut penulis adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana tersebut dapat terlaksana atau tercapai. Semakin banyak rencana yang tercapai maka semakin efektif pula kegiatan tersebut. Sehingga kata efektif dapat

³⁶Soewarno Handayani, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Gunung Agung, 2006),h.16

³⁷Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen* (Semarang: Universitas Diponegoro,2000),h.29

diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu yang hendak dicapai.

2. Anggaran

Anggaran (*Budgeting*) menurut Rudianto yaitu rencana kerja organisasi atau instansi dimasa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal dan sistematis³⁸. Adapun menurut Garrison, Norren dan Brewer anggaran merupakan rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama satu periode waktu tertentu³⁹.

Anggaran (*Budgeting*) menurut penulis adalah rencana suatu instansi atau organisasi perusahaan yang dilaksanakan di masa mendatang dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam satuan uang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD⁴⁰.

3. Manajemen Keuangan Syariah

Menurut pendapat Najmuddin manajemen keuangan adalah keseluruhan keputusan dan aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana tersebut berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian

³⁸Rudianto, *Penganggaran*, (Jakarta: Erlangga,2009),h.2

³⁹Garrison, Norren dan Brewer, *Akuntansi Manajerial*,(Jakarta: Salemba Empat,2007),h.4

⁴⁰ Peraturan Menteri and Dalam Negeri, *Peraturan Tentang Keuangan, Pengelolaan Dengan, Daerah*, 2006.

sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen bahwa upaya memperoleh dan mengalokasikan dana harus mempertimbangkan efisiensi (daya guna) dan efektivitas (hasil guna)⁴¹.

Teori manajemen keuangan syariah memiliki dua pengertian yaitu sebagai ilmu dan rangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis.

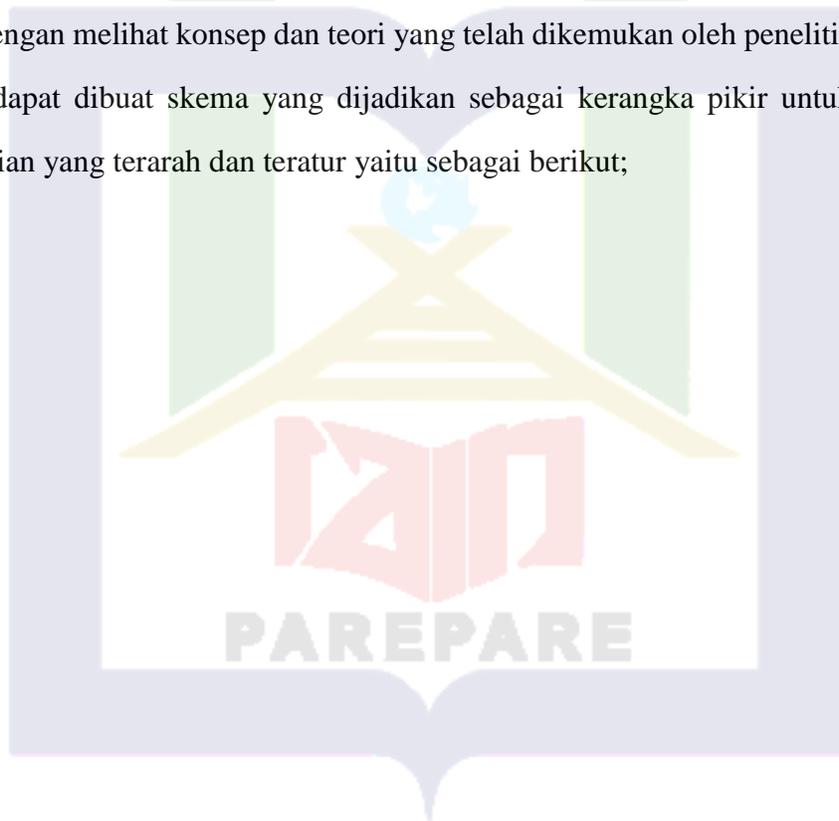
Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas yang termasuk kegiatan planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola asset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip syariah. Dengan kata lain manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam (prinsip syariah).

⁴¹Najmuddin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: Andi,2011),h. 9.

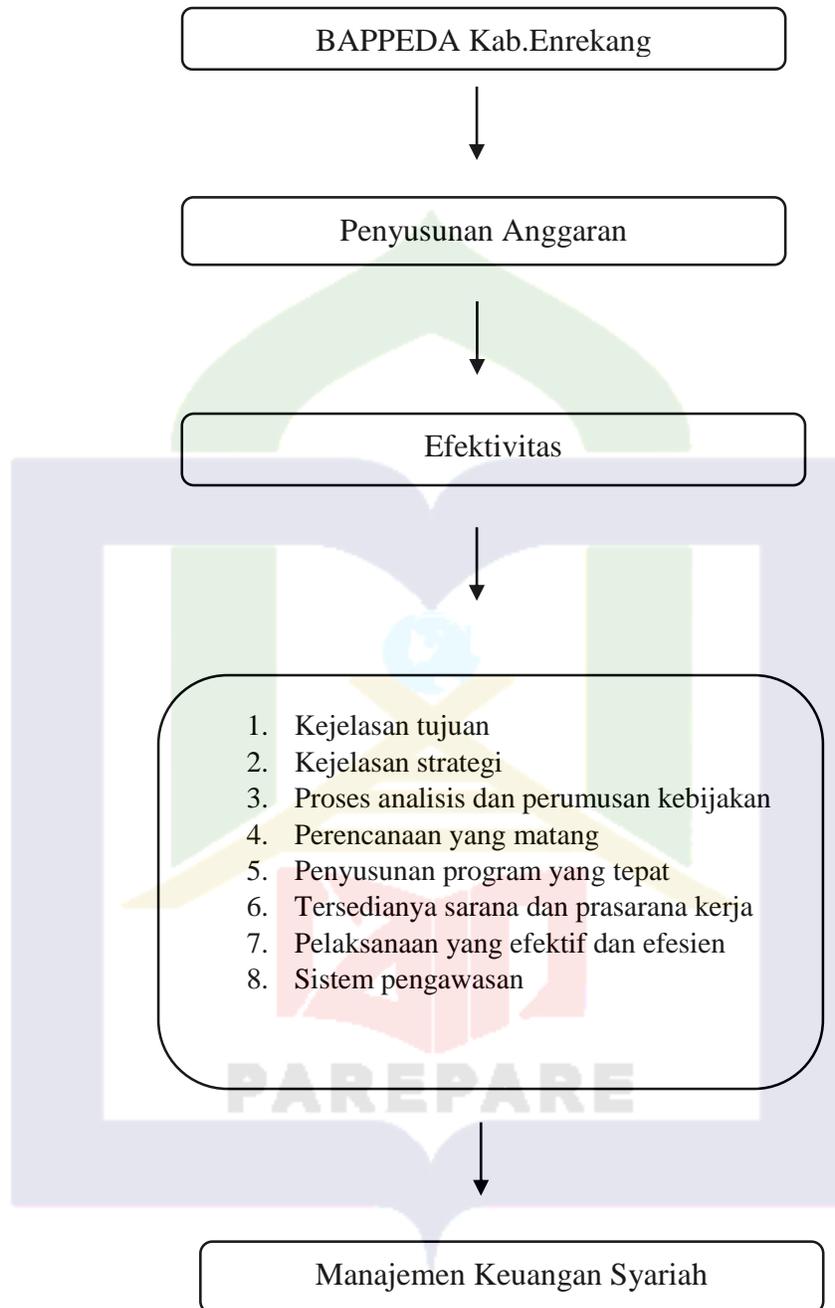
D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi dan terkonfirmasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir yang baik dan benar akan menjelaskan secara teoritis peraturan antara variabel yang akan di teliti⁴². Kerangka pikir akan mempermudah alur penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti.

Dengan melihat konsep dan teori yang telah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya, maka dapat dibuat skema yang dijadikan sebagai kerangka pikir untuk melakukan penelitian yang terarah dan teratur yaitu sebagai berikut;



⁴² Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.(Bandung: Alfabeta,2010),h.91



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan di dalam penelitian skripsi ini merujuk pada penulisan karya ilmiah berbasis teknologi informasi yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri IAIN PAREPARE, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi yang lainnya. Metode penelitian dalam buku-buku tersebut, memuat beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data⁴³.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan yakni pendekatan deskriptif-kualitatif, yakni penelitian yang berupaya untuk mengangkat, menuturkan, mendeskripsikan dan menafsirkan data-data yang diperoleh dari keadaan yang sebenarnya, sesuai fakta, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.

2. Jenis Penelitian

Adapun Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

⁴³ Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah berbasis Teknologi informasi*, Edisi Revisi (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 45

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jln. Jenderal Sudirman, Leoran, Kab. Enrekang.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu kurang lebih 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Efektivitas Penyusunan Anggaran Belanja Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang (Analisis Manajemen Keuangan Syariah).

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang dipergunakan di dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, yang artinya data-data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Dari data kualitatif ini dapat diperoleh melalui berbagai macam bentuk dari teknik pengumpulan data, adapun contohnya wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Adapun bentuk lain dari data kualitatif yakni gambar yang didapatkan pemotretan atau berbentuk video.

2. Sumber Data

Berdasarkan dari sumbernya data yang dipakai didalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yakni,

a) Data primer

Data primer yakni data yang didapatkan atau diperoleh secara langsung dilapangan⁴⁴, yaitu dimana peneliti mewawancarai kepala Bappeda, Sekertaris Bappeda, bendahara Bappeda, ketua bidang perencanaan dan keuangan, ketua bidang ekonomi, social budaya dan pemerintahan, ketua bidang penelitian pengembangan, monitoring evaluasi dan perencanaan dan staff bidang fungsional perencanaan madya

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan dari data yang didapatkan (diperoleh) secara tidak langsung dari sumbernya, biasanya diperoleh dalam bentuk dokumen, buku, jurnal ataupun melalui orang lain⁴⁵.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Terdapat beberapa teknik penelitian yang biasa digunakan untuk memperoleh dan mendapatkan data-data yang ada dilapangan. Pengumpulan data yaitu langkah-langkah yang ditempuh peneliti untuk menghimpun data-data yang dibutuhkan⁴⁶.

1. Metode Observasi

Metode observasi ini merupakan pengamatan dan mencatat suatu objek dengan sesuai sistematika fenomena yang terjadi. Pengambilan data-data secara langsung menggunakan indera mata. Di dalam observasi diperlukan ingatan terhadap

⁴⁴ Nasution, *Metode Research*, (Cet.IX; Jakarta, Rumi Aksara, 2007), h. 143

⁴⁵ Bayu Dardias Kurniadi, *Praktek Penilitia Kualitatif*, (Yogyakarta:PolGov,2011), h.11

⁴⁶ Erna Widodo dan Mukhtar, *Konstruksi Kearah Penelitian Deskriptif*, h. 30.

yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan atau alat elektronik lebih banyak menggunakan pengamat, memutuskan perhatian pada data yang relevan⁴⁷. Dalam observasi ini, penulis akan mengamati langsung keadaan yang ada di Kantor BAPPEDA Kabupaten Enrekang.

2. Metode Wawancara (*interview*)

Metode Wawancara yakni proses interaksi untuk memperoleh keterangan (sumber informasi) untuk penelitian dengan cara tanya jawab dengan komunikasi langsung atau bertatap muka secara langsung dengan menggunakan panduan wawancara yang terstruktur⁴⁸. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yang ada di BAPPEDA.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis⁴⁹. Metode Dokumentasi yakni pengambilan data berupa dokumen yang penting yang ada di BAPPEDA Kabupaten Enrekang contohnya, catatan, data arsip, transkrip buku serta catatan yang lain yang berkaitan dengan penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

⁴⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Cet I; Jakarta, Bumi Aksara,2008), h.53.

⁴⁸Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia: 2005), h. 11-12.

⁴⁹ Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah,2008),h. 158.

Agar data di dalam penelitian ini, dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu adanya dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data⁵⁰ adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas (*Credibility*). Uji Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data yang telah di peroleh atau hasil penelitian kualitatif diantaranya sebagai berikut;⁵¹

a) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru untuk mengecek kembali kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel.

b) Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

⁵⁰Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah berbasis Teknologi informasi*, Edisi Revisi (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 45.

⁵¹ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTL, R&D* (Cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.179.

c) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

d) Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

e) Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto dan lain sebagainya. Hal ini sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.

f) Mengadakan *Membercheck*

Membercheck yakni proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Caranya dapat

dilakukan secara individual, dengan cara peneliti datang ke pemberi data, atau melalui forum diskusi kelompok.⁵²

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara tersusun atau terstruktur dari data yang telah di peroleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Analisis data pada penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti pada dasarnya di mulai sejak memasuki lapangan dan setelah selesai di lapangan⁵³. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau yang berangkat dari kebenaran yang sifatnya umum mengenai suatu fenomena dengan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan⁵⁴

Menurut Miles dan Huberman,⁵⁵ analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Jadi analisis data menurut peneliti adalah suatu proses yang dipakai untuk menganalisis data berdasarkan pada pendapat yang khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

⁵² Sugiono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.270-276

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta,2010), h.336.

⁵⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet. 2: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.40.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. 22; Bandung; Cv Alfabeta,2015),h 246.

Adapun berikut ini, merupakan dari teknik analisis data yang dipakai oleh peneliti:

1. Reduksi Data

Menurut Pendapat Miles dan Huberman⁵⁶ mengungkapkan bahwa reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan dari mereduksi data bisa diartikan sebagai proses memilih hal-hal pokok kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, uraian singkat dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka peneliti akan mudah untuk memahami apa yang terjadi. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.⁵⁷

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap yang diartikan sebagai upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan pemahaman yang didapatkan oleh peneliti.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 246.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 249.

Tahap ini merupakan tahap kesimpulan dan verifikasi dari semua data yang diperoleh sebagai hasil penelitian⁵⁸.



⁵⁸ . Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung; Cv Alfabeta,2015),h 252-253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Penyusunan Anggaran Belanja Daerah di BAPPEDA Kabupaten

Enrekang

Hasil dari wawancara dengan Bapak Rachmad Sand selaku KASUBAG Perencanaan dan Keuangan mengatakan bahwa;

“Kalo perencanaannya dimulai dari RENSTRA selama 5 tahun penggunaannya, kemudian di Kabupaten di tahun 2021 dilakukan perubahan berubah nama jadi RENSTRA PERUBAHAN, kemudian RENSTRA itu, dijabarkan lagi ke dokumen ke dua yaitu RENJA, RENJA itu setiap satu tahun masa berlakunya setelah RENJA itu rampung dijabarkan lagi ke dokumen penganggaran RKA (Rancangan Kerja Anggaran) setelah final RKA dijabarkan lagi ke DPA, DPA inilah dokumen terahir kebijakan anggaran”.⁵⁹

Hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan tahapan-tahapan atau sistem penyusunan anggaran belanja daerah di BAPPEDA Kabupaten Enrekang dibagi menjadi beberapa tahapan secara umum yang digambarkan sebagai berikut;

1. RENSTRA (Rencana Staregi) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah naskah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah dan memuat maksud, tujuan, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

⁵⁹ Rachmad Sand, KASUBAG Perencanaan dan Keuangan, *Wawancara* di Enrekang, 06 Juni 2022.

Dokumen Renstra Bappelitbang Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 disusun dengan menggunakan dua pendekatan perencanaan pembangunan daerah, yaitu pendekatan yang pada substansi dan proses. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah berorientasi proses mengedepankan empat pendekatan utama, yakni teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Secara teknokratik, dilaksanakan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Memanfaatkan proses partisipatif, dilaksanakan dan memadukan kepentingan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Secara politis, hal itu dilakukan dengan memasukkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang dibahas dan didiskusikan dengan DPRD. Perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten atau kota, daerah provinsi hingga nasional. Sedangkan pendekatan perencanaan pembangunan daerah berorientasi substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Holistik-tematik dalam dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur, bagian, kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Integratif melibatkan menyatukan beberapa otoritas ke dalam satu proses kohesif dengan fokus yang berbeda pada pencapaian tujuan pembangunan. Perencanaan untuk dimensi spasial interior dilakukan saat berhadapan dengan ruang. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang telah berjalan efektif selama dua tahun, dan telah dilakukan revisi

atau perubahan karena adanya berbagai perubahan dinamika lingkungan strategis, terutama bencana non-alam (Pandemi Covid-19), terjadinya Resesi Ekonomi, perubahan kebijakan Nasional seiring dengan terbitnya RPJMN Tahun 2020-2024, dan terbitnya berbagai peraturan perundangan yang baru. Perubahan RPJMD Kabupaten Enrekang tersebut menjadi landasan dalam melakukan perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Enrekang dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra Perubahan, penyusunan rancangan Renstra perubahan dan pelaksanaan forum lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir Renstra, hingga Penetapan Renstra perubahan Bappedalitbang Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023.

Pendekatan substansial, penyusunan Renstra Bappelitbangda sedikitnya mengacu pada tiga peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Perubahan Bappelitbangda Tahun 2018-2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar 4.1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD



Sumber: Dokumen Renstra Perubahan Kabupaten Enrekang tahun 2018-2023

Penyusunan Perubahan Renstra ini dimaksudkan untuk menjabarkan lebih lanjut RPJMD Perubahan Kabupaten Enrekang tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Penyusunan Perubahan Renstra ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas badan perencanaan pembangunan daerah dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018–2023. Renstra ini sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA.

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Enrekang merupakan sebagai unit kerja perencanaan penelitian dan pengembangan yang menjalankan tugas pokok,

fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi dibidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Bappeda yang handal dengan didukung oleh kualitas dan kuantitas aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih periode tahun 2018-2023.

2. RENJA (Rencana Kerja)

Rencana Kerja digunakan sebagai pedoman kerja atau panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program atau kegiatan dalam 1 (satu) tahun periode dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ke dalam perencanaan tahunan yang lebih bersifat operasional.

Rencana kerja satuan kerja BAPPEDA Kabupaten Enrekang dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2020 yang memuat program dan kegiatan yang merupakan kegiatan yang merupakan tolak ukur penilaian kinerja dan alat bantu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk secara konsekuen dan konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah;

- a) Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Bappeda-Litbang berdasarkan Renstra Bappeda-Litbang dan hasil

Musrembang RKPD untuk melaksanakan fungsi dari Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang

- b) Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
- c) Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan BAPPEDA Kabupaten Enrekang.
- d) Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi BAPPEDA Kabupaten Enrekang serta indikator kinerja BAPPEDA yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pengimplementasian dan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda tahun 2018-2023, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Enrekang untuk tahun 2020 sebagai implementasi tahun kedua dari Renstra Bappeda yang dimaksud.

Proses penyusunan Renja Bappelitbangda telah melalui mekanisme, mulai dari Musrembang yang nantinya akan ditindaklanjuti kedalam dokumen RKPD, KUA-PPAS, RKA dan RAPBD tahun 2020.

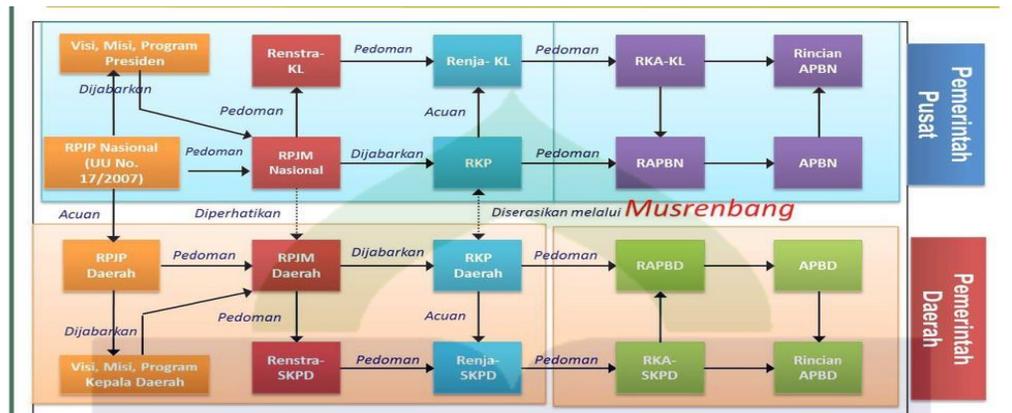
Hubungan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Enrekang dengan Dokumen Perencanaan lainnya yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2018-2023, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, Renstra Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) satu tahunan.

Keterkaitan dokumen rencana kerja (Renja) BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Enrekang dapat dilihat di beberapa uraian berikut;

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan dua puluh (20) tahun dan memuat visi, misi, dan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap lima tahun sekali.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJPD dan memuat visi, misi, gambaran umum, kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi dan indikasi sumber pembiayaan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Enrekang.
- 3) Rencana Strategi Bappeda-Litbang Pemerintahan Kabupaten Enrekang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Bappeda-Litbang.

Gambar 4.2 Keterkaitan antara Renja-OPD dengan Dokumen Perencanaan dan penganggaran lainnya.



Sumber: Dokumen Bappeda-Litbang Pemerintah Kabupaten Enrekang

Mengacu pada gambar yang di sajikan di atas dapat di ketahui secara terperinci hubungan Renja-OPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya adalah sebagai berikut;

- Renja-OPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Renstra-OPD dan hasil musrenbang.
- Renja-OPD disusun dengan berpedoman pada RKPD yang di dalamnya memuat mengenai visi, misi, arah dan prioritas pembangunan daerah.
- Renja-OPD ini nantinya akan menjadi pedoman pada proses penyusunan RKA-OPD dan penganggaran pada RAPBD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD.

Pada program dan kegiatan Renja pada Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang merencanakan sebanyak sebelas program dan Sembilan puluh empat (94) kegiatan dengan rencana pagu anggaran sebesar Rp. 11.514.186.000,-. Program dan kegiatan prioritas beserta indikator kinerja Bappeda untuk perencanaan tahun 2020 diperlihatkan berikut ini;

4.3 Gambar Rumusan Rencana Program Kegiatan BAPPEDA-LITBANG tahun 2020 dan perkiraan maju tahun 2021

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA-LITBANG TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021														
Nomor Rencana	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikator	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah	Kec.		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan						Hasil Kegiatan	
					Tolak Ukur	Tar. ges.	Tolak Ukur	Tar. ges.					Tolak Ukur	Tar. ges.
106010	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Misi III : Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi	Sasaran X : Meningkatkan dan transparansi pengelolaan pembangunan dan ketangangan daerah	Happedalibang	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai standar perundangan yang berlaku	100%				1.695.000,000	1.864.500,000			
106010	Verifikasi/Asistensi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah			Happedalibang	Jumlah Rancangan Renja yang diverifikasi/Asistensi	43	Persentase Dokumen Rancangan Renja yang telah diverifikasi	100	37.500,000	41.250,000	Bappedalibang			

Nomor Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangko Daerah	K		
					Hasil Program		Kelembutan Kegiatan						Hasil Kegiatan	
					Tolak Ukur	Tar get	Tolak Ukur	Tar get					Tolak Ukur	Tar get
1 0 01.06 2 3 0 01 1 9	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan			Bappeda-Litbang			Jumlah Dokumen Hasil Updating dan Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan di Kab. Enrekang	1	Tingkat ketersediaan data informasi hasil pelaksanaan pembangunan di Kab. Enrekang	100	70,000,000	77,000,000	Bappeda-Litbang	
1 0 01.06 2 4 0 01 1 0	Penyusunan dan Pengumpulan data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan			Bappeda-Litbang			Persentase Ketersediaan data informasi kebutuhan penyusunan Dok Perencanaan	95	Tersedianya Data Informasi Kebutuhan Perencanaan Pembangunan (%)	100	80,000,000	88,000,000	Bappeda-Litbang	
1 0 1.06. 2 4 0 01 1 1	Penyusunan Daftar Alokasi Kegiatan /Prorok APBD I/APBD II/APBN			Kab. Enrekang			Jumlah Dokumen Daftar Alokasi kegiatan (Dok.)	1	Tersedianya dokumen daftar alokasi kegiatan pada 12 Kecamatan	100	22,500,000	24,750,000	Bappeda-Litbang	
1 0 1.06. 2 4 0 01 1 2	Updating E-Planning dan E-Money			Bappeda-Litbang			Jumlah Pengembangan (Updating) Perangkat Lunak E-planning dan E-money (Aplikasi)	2	Tersedianya Data hasil Musrenbang dalam E-Planning dan Informasi Pelaksanaan Kegiatan dalam E-Money (%)	100	130,000,000	143,000,000	Bappeda-Litbang	

Sumber: dokumen Renja BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Enrekang tahun 2021

3. RKA (Rencana Kerja Anggaran)

Rencana Kerja Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran di BAPPEDA Kabupaten Enrekang.

4. DPA(Dokumen Pelaksanaan Anggaran)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang di dalamnya memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh penggunaan anggaran tersebut. Pada dasarnya, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dibuat oleh SKPD yakni dokumen untuk melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang telah dibuat sebelumnya. Pembuatan DPA yang telah disesuaikan dengan struktur anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) berisikan ringkasan anggaran pendapatan satuan kerja perangkat daerah (DPA- PENDAPATAN SKPD), ringkasan anggaran belanja satuan kerja perangkat daerah (DPA- BELANJA SKPD) dan ringkasan anggaran pembiayaan daerah satuan kerja perangkat daerah (DPA- PEMBIAYAAN SKPD).

B. Efektivitas Penyusunan Anggaran Belanja Daerah di BAPPEDA Kabupaten Enrekang berdasarkan Manajemen Keuangan Syariah

Efektivitas menurut pendapat Agung Kurniawan merupakan kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dari suatu instansi atau lembaga yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara para pelaksananya.⁶⁰

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat terlaksana. Dari pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan suatu gambaran seberapa jauh target yang telah direncanakan sebelum dapat tercapai⁶¹.

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap instansi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari suatu lembaga atau instansi akan dapat tercapai akan terlaksana apabila

⁶⁰ Agung Kurniawan, *'Transformasi Pelayanan Publik'* (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), h. 109.

⁶¹ Soedarmayanti, *'Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja'* (Bandung: Maju, Mandar, 2006), h. 61.

didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas. Selain itu, penulis juga menyimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target atau rencana yang ditetapkan sebelumnya dapat terlaksana.

1. Ukuran efektivitas

Mengukur efektivitas suatu instansi atau lembaga bukan hal yang mudah, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Adapun ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak sebagaimana yang dikemukakan oleh S.P Siagian, yaitu;⁶²

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

”Visi Misi di BAPPEDA sudah disinkronkan dengan RPJP Visi Misi Bupati, rancangan RPJP merupakan turunan RKPD dari Visi Misi Bupati kemudian dari tujuan itu akan disandingkan dengan fungsinya (BAPPEDA), tugas pokok dan fungsi BAPPEDA itu apa. Jadi BAPPEDA bertugas untuk menjadi organisasi perangkat daerah perencanaan, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan yang berjalan”⁶³.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak BAPPEDA diperoleh bahwa Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari

⁶² Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Pert (Jakarta: BinaPurna, 2008),h. 77

⁶³ Muh. Aries Yasin, Sekretaris BAPPELITBANGDA, *Wawancara* di Enrekang, 06 Juni 2022

pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1–5 tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Enrekang.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Bappelitbangda Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 adalah:

1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan, penelitian, dan pengembangan yang berkualitas.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Bappelitbangda terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaannya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Enrekang. Perencanaan yang berkualitas ini mengandung arti bahwa target capaian kinerja tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Enrekang sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat dicapai melalui perencanaan dan pengendalian yang baik serta adanya meningkatkan Inovasi dalam pembangunan daerah.

4.1 Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Enrekang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023
Misi-3: Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi							
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan, penelitian, dan pengembangan yang berkualitas.		Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	57,49 %	100%	95 %	95 %	95 %
	Meningkatnya konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	98%	89,53	90 %	90 %	90 %
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda		Nilai SAKIP Bappelitbangda	NA	76,36	80	82	85

	Meningkatkan pencapaian kinerja sasaran Bappelitbangda	Persentase pencapaian kinerja Bappelitbangda	92,39	93,51	95 %	95 %	95 %
--	--	--	-------	-------	------	------	------

Sumber Dokumen Renstra Perubahan Kabupaten Enrekang tahun 2018-2023

b. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Kejelasan strategi yang digunakan dalam BAPPEDA harus dilakukan dan telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan lembaga atau organisasi.

Melalui hasil wawancara dengan bapak Rachmad Sand selaku KASUBAG Perencanaan dan Keuangan mengatakan bahwa;

”Bahwa kejelasan strategi ini sudah tertuang dalam renstra yang dimana renstra ini dibuat dalam kurung waktu 5 tahun”.⁶⁴

Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis, diperoleh bahwa kejelasan strategi pada BAPPEDA Kabupaten Enrekang sudah sangat jelas dengan melihat Rencana Strategi (RENSTRA) yang sudah dibuat sebelumnya dalam jangka waktu lima (5) tahun kedepan. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan

⁶⁴ Rachmad Sand, KASUBAG Perencanaan dan Keuangan, *Wawancara* di Enrekang, 06 Juni 2022.

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi yang diemban BAPPEDA Kabupaten Enrekang tahun 2018-2023. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

4.2 Tabel Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

VISI	Terwujudnya Enrekang Maju, Aman Sejahtera (EMAS) yang Berkelanjutan dan Religius		
MISI-3	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan, penelitian, dan pengembangan yang berkualitas.	Meningkatnya konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Penyediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penggunaan Teknologi Informasi Terintegrasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah

		Mengoptimalkan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Peran Unit Kerja Bappelitbangda dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah
			Penguatan jejaring/mitra perencanaan pembangunan dari tingkat desa hingga ke tingkat pusat.
	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Mendorong pelibatan masyarakat/ organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penelitian dalam pembangunan daerah	Memfasilitasi inovator dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Meningkatkan pencapaian kinerja sasaran Bappelitbangda	Meningkatkan kualitas pelayanan Bappelitbangda	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perkantoran Meningkatkan kualitas dan disiplin ASN Bappelitbangda Kab. Enrekang. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja Bappelitbangda

Sumber: dokumen dari Renstra Kabupaten Enrekang tahun 2018-2023

c. Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang mantap

Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatangi tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

Melalui hasil wawancara dengan bapak Rahmad Sands selaku KASUBAG Perencanaan dan Keuangan mengatakan bahwa;

”Arah dan kebijakan itu melihat lagi kearah Visi Misi, jadi Visi Misi Kabupaten Enrekang itu sudah jelas terukur dalam 5 tahun harus di mengerti oleh setiap OPD”⁶⁵.

Melalui hasil wawancara tersebut, diperoleh bahwa proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap dengan melihat kembali kearah Visi Misi Kabupaten Enrekang yang sudah dibuat dalam kurun waktu 5 tahun.

d. Perencanaan yang matang

Pada hakekatnya memutuskan program apa yang dikerjakan organisasi dimasa yang akan datang atau masa depan. Perencanaan belanja daerah di Kabupaten Enrekang sudah direncanakan sebelumnya yang sudah tertuang dalam RPJMD.

Melalui hasil wawancara dengan bapak Rahmad Sand selaku KASUBAG Perencanaan dan Keuangan mengatakan bahwa;

⁶⁵Rachmad Sand, KASUBAG Perencanaan dan Keuangan, *Wawancara* di Enrekang, 06 Juni 2022.

“Jadi kebijakan perencanaan itu sudah tertuang dalam RPJMD Bupati ada namanya itu arah kebijakan harus dimengerti oleh setiap OPD. Kemudian RPJMD itu berlakunya juga selama 5 tahun”.⁶⁶

Melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat di simpulkan bahwa, Program dan kegiatan BAPPEDA Kabupaten Enrekang dilaksanakan dan dilakukan sebagai upaya mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan sebagaimana tercantum dalam Renstra Perubahan BAPPEDA Kabupaten Enrekang. Rencana program dan kegiatan yang ditetapkan dan selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi.

e. Penyusunan Program Yang Tepat

Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat apabila tidak para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

Melalui wawancara dengan Bapak Rusman Situnda selaku KABID Monev BAPPEDA Perencanaan Makro mengatakan bahwa;

”Penyusunan yang program yang tepat saya kira selama ini program yang ada di BAPPEDA Kabupaten Enrekang selalu tepat karena kita tidak pernah melewati waktu yang telah di tetapkan selalu tepat pada waktunya”⁶⁷.

⁶⁶ Rachmad Sand, KASUBAG Perencanaan dan Keuangan, *Wawancara* di Enrekang, 06 Juni 2022.

⁶⁷Rusman Situnda, KABID Monev BAPPELITBANGDA Perencanaan Makro, *Wawancara* di Enrekang, 06 Juni 2022.

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penyusunan anggaran belanja daerah di kantor BAPPEDA Kabupaten Enrekang sudah sesuai jadwal atau sudah dilaksanakan dengan tepat waktu.

f. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

Melalui wawancara dengan Ibu Ika Merdekawati W selaku KABID EKSOSBUD mengatakan bahwa;

“Saya kira sarana dan prasarananya sudah lengkap ada Gedung Kendaraan, alat ATK, Komputer, AC, Ruangan yang Nyaman. Saya kira itu sudah lengkap artinya BAPPEDA Kabupaten Enrekang itu sarana dan prasarana sudah memadai”⁶⁸

Hasil dari wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas Bappedalitbangda atau BAPPEDA Kabupaten Enrekang di dukung dengan sarana dan prasarana yang sudah terfasilitasi dengan lengkap. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini:

4.3 Tabel Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang
1	Mobil	2	19	Brankas	1

⁶⁸Ika Merdekawati W, KABID EKSOSBUD, *Wawancara* di Enrekang, 06 Juni 2022.

2	Sepeda Motor	18	20	Mesin Ketik	1
3	Lemari	13	21	Loudspeker	1
4	Filling Besi	2	22	Meja tennis	1
5	Papan Pengumuman	3	23	Peralatan Jaringan	1
6	Meja Kerja	54	24	Mesin Pemotong Rumput	2
7	Kursi	112	25	TV	3
8	AC	17	26	Vacum	1
9	PC Unit	10	27	Mimbar	1
10	Handpone	2	28	CCTV	16
11	Camera	3	29	Scanner	1
12	GPS	2	30	Microphone	3
13	Portable	1	31	Mixer PC	1
14	Proyektor	4	32	Generator set	1
15	Fax	1	33	Kulkas	1
16	Laptop	27	34	Meja Biro	1
17	Printer	24	35	Alat RT Lainnya	1
18	UPS	1			

Sumber: Dokumen Renstra Kabupaten Enrekang tahun 2018-2023

g. Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien

Pelaksanaan efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan menacapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Aries Yasin selaku Sekretaris BAPPELITBANGDA mengatakan bahwa;

“ Saya kira selama ini sudah efektif dan efisien bisa kita lihat dari pencapaian setiap program atau kegiatan yang telah dilaksanakan, kalau untuk efisien kita kan memakai yang namanya skala prioritas jadi kita melihat di daerah yang paling membutuhkan jadi kita buat program yang sesuai dengan kebutuhan”.⁶⁹

Hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan efektivitas dan efisien program yang ada di BAPPEDA Kabupaten Enrekang sudah berjalan dengan baik bisa dilihat dari pencapaian program seperti yang bapak Muh. Aries Yasin, katakan di atas.

4.4 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda-litbang Kabupaten Enrekang

No.	Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Kinerja Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Urusan Perencanaan Pembangunan																	
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada						Ada					100				

⁶⁹ Muh. Aries Yasin, Sekretaris BAPPEDALITBANGDA, *Wawancara* di Enrekang, 06 Juni 2022

2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA			Ada		Ada		Ada		Ada		100		100			
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD			100%	100%			100	100			100	100				
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD			100%	100%			100	100			100	100				

Sumber: Dokumen Renstra Kabupaten Enrekang tahun 2018-2023

h. Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Melalui hasil wawancara dengan bapak Rachmad Sand selaku KASUBAG Perencanaan dan Keuangan mengatakan bahwa;

“Kan kita di BAPPEDA ada yang namanya inspektorat selaku dinas yang melakukan pengawasan mengawasi jalannya program. Pada pengawasannya itu dilihat bagaimana usulan program sesuai dengan kewenangan BAPPEDA apakah sudah termasuk skala prioritas atau tidak dari sisi pengawasan pelaksanaan program yang masing-masing membuat secara administrasi setiap belanja dibuatkan SPJ Surat Pertanggung Jawaban yang isinya dia membelanjakan kemana, dia programnya apa”⁷⁰.

Hasil dari wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian yang ada di BAPPEDA Kabupaten Enrekang sudah diawasi oleh Inspektorat selaku Dinas yang mengawasi jalan kegiatan yang sedang dilakukan dengan membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban).

Manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Maka setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme.

Manajemen keuangan syariah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip syariah.

Perlu adanya manajemen yang baik dan harus memenuhi syarat-syarat yang tidak boleh atau tidak bisa ditinggalkan dalam menjalankan sebuah pengelolaan agar

⁷⁰ Rachmad Sand, KASUBAG Perencanaan dan Keuangan, *Wawancara* di Enrekang, 06 Juni 2022.

diperolehnya hasil yang optimal untuk mencapai keridhaan Allah swt. Berikut beberapa prinsip manajemen syariah diantaranya:

a. Menegakkan Keadilan

Agar dapat tercapainya kesuksesan dalam melaksanakan manajemen maka perlu dilandasi dengan sikap adil karena pada dasarnya Allah swt. Memerintahkan bersikap adil dalam melakukan hal apapun. Setiap perbuatan atau perilaku harus dilakukan secara adil. Adil dalam hal penyusunan, adil dalam hal menakar dan menimbang, adil dalam bertindak dan adil dalam menghukum.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Rusman Situnda selaku KABID Monev BAPPELITBANGDA Perencanaan Makro yang mengatakan bahwa;

“Keadilan itu berproporsional, itu tadi keadilan itu tidak mesti ini kan tidak mesti sama rata kan. Proporsional itu kan tergantung kebutuhan prioritas daerah. Daerah itu di support oleh amanah kemudian adanya daya dukung kemampuan sumber daya serta kebutuhan-kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya prioritas itu yang alokasikan anggaran yang lebih besar begitu”⁷¹.

Begitu juga yang di sampaikan bapak Rachmad Sand selaku Kabid Perencanaan dan Keuangan dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa;

“Saya kira sudah adil, tapi dilihat lagi adil kan berbeda-beda. Jadi adil itu menurut perspektif masing-masing karena pada pemilihan pagu indikatif”⁷²

⁷¹ Rusman Situnda, KABID Monev BAPPELITBANGDA Perencanaan Makro, *Wawancara* di Enrekang, 06 Juni 2022.

⁷² Rachmad Sand, Kabid Perencanaan dan Keuangan, *Wawancara* di Enrekang, 06 Juni 2022.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyusunan anggaran belanja daerah di Kabupaten Enrekang sudah efektif berdasarkan salah satu prinsip manajemen keuangan syariah yaitu Menengakkan Keadilan, dikarenakan pihak Bappeda di Kabupaten Enrekang sudah menggunakan skala prioritas yang dimana adil atau keadilan itu tidak harus dan tidak mesti sama dan seimbang, dimana pihak BAPPEDA Kabupaten Enrekang mengutamakan yang paling membutuhkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Ar-Rahman/55:9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya:

“Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu”⁷³

b. Amanah dan bertanggung jawab

Amanat terdiri atas tanggung jawab manusia kepada semua, tanggung jawab kepada tuhan dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Makna dari setiap prinsip tersebut berarti bahwa setiap individu mempunyai kedudukan fungsional dan interaksi antara sesama manusia itu dituntut agar dapat melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Individu atau orang yang memiliki sifat amanah akan memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya dan tidak menciderainya.

⁷³*Al-Qur'an Al-karim Dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Toha Putra, 1996).

Melalui hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Muh. Yasin selaku sekretaris yang mengatakan bahwa;

“Kalo yang bertanggung jawab pasti karna kan kita punya dalam laporan. Pencapaian kinerja per triwulan biasanya. Karena apalagi anggarannya berbasis kinerja otomatis pelaksanaannya memenuhi kaidah-kaidah yang indikator yang dimaksud dalam penelitian yang peneliti lakukan sekarang”⁷⁴.

Begitu juga yang disampaikan bapak Hendra selaku bendahara BAPPEDA Kabupaten Enrekang dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa;

“Kalo amanah dan bertanggung jawab, kan ketika sudah ada program yang terima dan disetujui maka akan dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan tersebut. Dan jika terjadi apa-apa maka pihak yang bertugas menjalankan program tersebut yang akan bertanggung jawab”⁷⁵.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa di dalam proses penyusunan anggaran belanja daerah yang di lakukan oleh BAPPEDA di Kabupaten Enrekang sudah efektif berdasarkan salah satu prinsip manajemen keuangan syariah yakni amanah dan bertanggung jawab, karena dilakukan sesuai dengan program yang telah disetujui, maksudnya pihak BAPPEDA sudah amanah dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan atau program yang telah disetujui sebelumnya. Di karenakan pihak yang menjalankan program tersebut akan bertanggung jawab penuh atas program atau kegiatan yang sedang dikerjakannya. Dimana para pihak yang mengerjakan

⁷⁴Muh. Aries Yasin, Sekretaris Bappeda-Litbang, *Wawancara* di Enrekang, 06 Juni 2022.

⁷⁵ Hendra, Bendahara Bappeda-Litbang, *Wawancara* di Enrekang, 06 Juni 2022.

program atau kegiatan itu, pastinya akan memiliki laporan pertanggungjawaban, pastinya mereka akan melaksanakan sesuai program atau kegiatan tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al- Mukminun/23:8

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ⁷⁶

Terjemahnya:

“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya”⁷⁶.

Ayat diatas menjelaskan mengenai diperlukan memelihara amanat yang telah diberikan baik dari pimpinan maupun orang lain. Amanat terdiri atas tanggung jawab manusia kepada semua, tanggung jawab kepada tuhan dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Karena nantinya amanah atau amanat nantinya akan dimintai pertanggung jawabannya.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Bappelitbangda	76,36	80	82	85	85

⁷⁶ Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya (Semarang:PT. Toha Putra,1996)

2	Persentase Capaian Kinerja Program Bappelitbangda	93,51	95%	95%	95%	95%
3	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	100	95%	95%	95%	95%
4	Persentase konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	89,53	90%	90%	90%	90%

Sumber: Dokumen Renstra Kabupaten Enrekang tahun 2018-2023

c. Komunikatif

Berhubungan dalam konteks manajemen implementasi itu sendiri, mengelola komunikasi sangat penting dalam melakukan transformasi pilihan keputusan atau kebijakan dalam rangka pelaksanaan manajerial itu sendiri menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Untuk menjalankan hal tersebut di perlukan kemampuan komunikasi yang baik agar pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dapat mengetahui, memahami dan mengerti bagaimana menjalankannya.⁷⁷

Melalui hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Muh. Aries Yasin selaku sekretaris yang mengatakan bahwa;

“Kalau komunikatif pasti dikarenakan melalui proses rapat, proses koordinasi kemudian proses analisis yang mendalam”⁷⁸.

Begitu juga yang di sampaikan Bapak Syaharuddin selaku Fungsional Perencanaan Madya, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa;

⁷⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percepatan UPP AMP YKPN,2005), H. 183

⁷⁸ Muh. Aries Yasin, Sekretaris Bappeda-Litbang, *Wawancara* di Enrekang, 06 Juni 2022.

“Sebenarnya pemerintah daerah mulai dari perencanaan sampai kegiatan penyusunan anggaran selalu di komunikasikan, selalu dirapatkan malahan pada saat pembagian KUA (Kebijakan Umum Anggaran) kan di berikan kesempatan kepada teman-teman bidang perencana melakukan konsolidasi ke pimpinannya”⁷⁹.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa dalam proses penyusunan anggaran belanja daerah di Kabupaten Enrekang sudah efektif berdasarkan salah satu prinsip manajemen keuangan syariah yang terahir yaitu komunikatif, dimana pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Enrekang dalam melakukan penyusunan anggaran belanja daerah tentunya mereka akan melakukan rapat dan koordinasi dahulu sebelum ditetapkannya anggaran belanja. Jadi pihak BAPPEDA Kabupaten Enrekang akan meminimalisir anggaran yang tidak diperlukan atau anggaran yang akan dikeluarkan kurang sesuai dengan programnya nantinya.

⁷⁹ Syaharuddin, Fungsional Perencanaan Madya, *Wawancara* di Enrekang,06 Juni 2022.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut;

1. Berdasarkan dari melihat dari sistem penyusunan anggaran belanja daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang yang terdiri dari beberapa tahapan alur diantaranya yaitu;

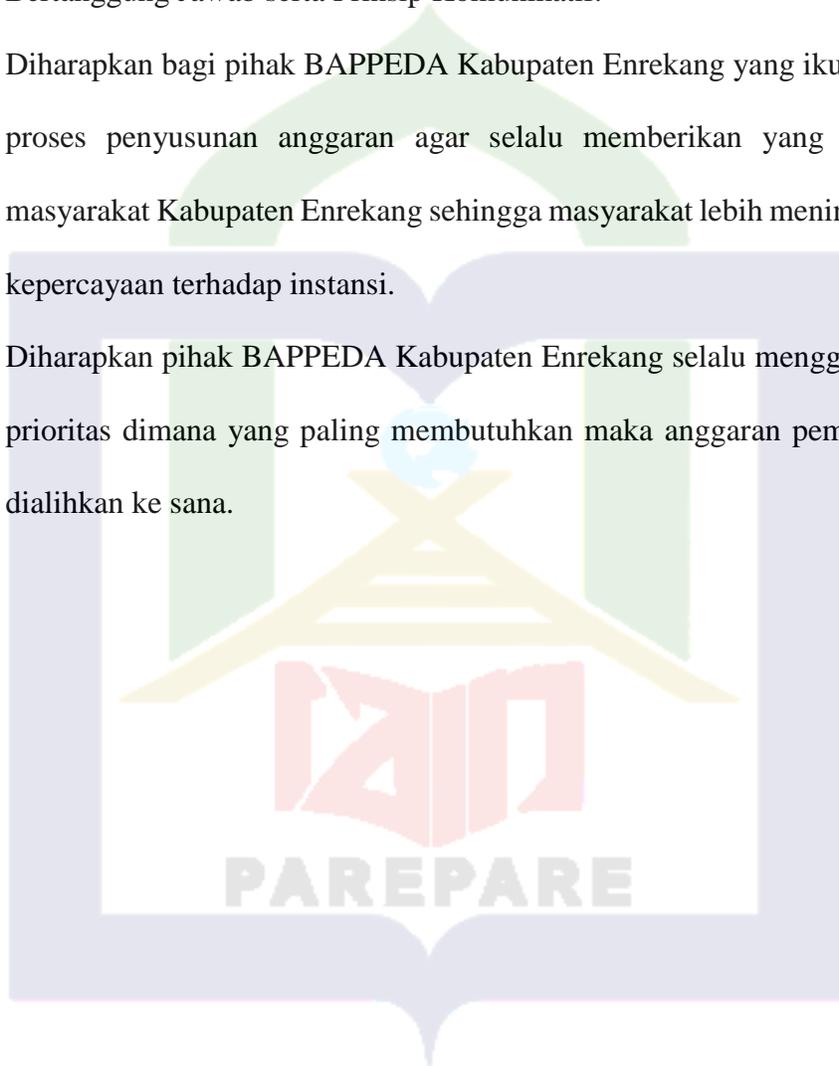
- Renstra (Rencana Strategi)
- Renja (Rencana Kerja)
- RKA (Rencana Kerja Anggaran)
- DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

2. Berdasarkan dalam efektivitas penyusunan anggaran belanja daerah di BAPPEDA Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan manajemen keuangan syariah yang dimana telah menerapkan atau telah menggunakan Prinsip Menegakkan keadilan, Prinsip Amanah dan Bertanggung Jawab serta Prinsip Komunikatif.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil Efektivitas Penyusunan Anggaran Belanja Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang (Analisis Manajemen Keuangan Syariah) diatas, maka penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kemajuan pada BAPPEDA Kabupaten Enrekang sebagai berikut;

1. Diharapkan bagi pihak BAPPEDA Kabupaten Enrekang yang melakukan penyusunan anggaran agar selalu memerhatikan dan meningkatkan dan mengedepankan Prinsip Menegakkan keadilan, Prinsip Amanah dan Bertanggung Jawab serta Prinsip Komunikatif.
2. Diharapkan bagi pihak BAPPEDA Kabupaten Enrekang yang ikut serta dalam proses penyusunan anggaran agar selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Enrekang sehingga masyarakat lebih meningkatkan rasa kepercayaan terhadap instansi.
3. Diharapkan pihak BAPPEDA Kabupaten Enrekang selalu menggunakan skala prioritas dimana yang paling membutuhkan maka anggaran pemerintah akan dialihkan ke sana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'an Al-Karim

- Abu Sin, Ahmad Ibrahim *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo,2006)
 Azwar, Saifuddin *Metode Penelitian* (Cet. 2: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
 Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik*,(Jakarta: Erlangga.2010)
 Bayu Dardias Kurniadi, *Praktek Penilitia Kualitatif*, (Yogyakarta:PolGov,2011)
 Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2007)
- Erna Widodo dan Mukhtar, *Konstruksi Kearah Penelitian Deskriptif*,
 Garrison, Norren dan Brewer, *Akuntansi Manajerial*,(Jakarta: Salemba Empat,2007)
 Handayaniingrat, Soewarno *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*,
 (Jakarta: Gunung Agung, 2006)
- Handayaniingrat, Soewarno *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*,
 (Jakarta: Gunung Agung, 2006)
- Hendra Karianga, *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*, (Depok: Kencana, 2007)
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Cet I; Jakarta, Bumi Aksara,2008)
- Kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1976)
- Kurniawan, Agung *Transformasi Pelayanan Public* (Yogyakarta: pembaharuan, 2005),
- Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 2016)
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*,(Yogyakarta: Andi Offset,2002)
 Martani dan Lubis, *Teori Organisasi* (Bandung: Ghalia Indonesia,1987)
 Menteri, Peraturan, and Dalam Negeri, *Peraturan Tentang Keuangan, Pengelolaan Dengan, Daerah*, 2006
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percepatan UPP AMP YKPN,2005)
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004)
 Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YPKN,2014)
 Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: Andi,2011)
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*, (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia: 2005)

- Nasution, *Metode Research*, (Cet.IX; Jakarta, Rumi Aksara, 2007)
- P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008)
- Penyusun, Tim, *Penulisan Karya Ilmiah berbasis Teknologi informasi*, Edisi Revisi (Parepare: IAIN Parepare, 2020)
- Prastowo, Andi, *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif* (Yogyakarta: Diva Press,2012).,
- Republik Indonesia, *Pemerintah Dalam Negeri No. 58 Tahun 2005*
- Rudianto, *Penganggaran*, (Jakarta: Erlangga,2009)
- Sondang, P. Siagan, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama)* (Jakarta: Binapura Aksara, 2008)
- Strees. M. Richard, *Efektivitas Organisasi*,(Jakarta:Erlangga, 1985)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*(Cet. 22; Bandung; Cv Alfabeta,2015)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, endekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* (Bandung: Alfabeta,2010)
- Sukirno, Sadono *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2006),
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen* (Semarang: Universitas Diponegoro,2000)
- Suwardi, Basrowi *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah,2008)
- Ulum. Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik* (Malang:UMM)

B. Skripsi/Jurnal

- Anwar, Anita, ‘Efektivitas Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pada Kantor Bappeda Kabupaten Soppeng’, 2019
- Hasanah,Uswatun ‘Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Litbang Kota Palembang Tahun 2012-2016 Skripsi’, 2018
- Lilly Ibrahim,Muh Nur Abdi, Elyang, ‘Analisis Perencanaan Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Kantor Badan’, *Ilmu Manajemen*, 4 (2020)
- Melania Rampengan, Grace B. Nangoi, Hendrik Manossoh., ‘Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado’, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16.03 (2016)
- Petra, Berta Agus, and Yosi Puspita Sari, ‘Analisa Efektivitas Dan Efisiensi

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat’,
Jurnal EKOBISTEK, 10.1 (2021), h.84-88

Retnosugiharti, Rr, and Jumaroh, ‘Efektifitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja: Studi Kasus Di BAPPEDA Kabupaten Temanggung’, *Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar Magelang*, 1.1 (2021), 55–68

Sumenge, Ariel Sharon, And Fakultas, ‘Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan’, 1.3 (2012)

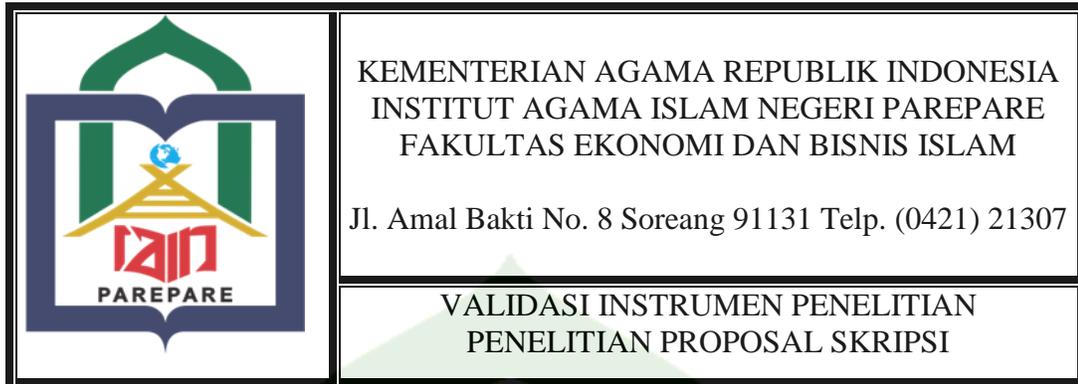
Tamasoleng, Adelstin, ‘Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro’, *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen Vol.3 ,No.1, 2015: 97-110, Vol.3 ,No. (2015)*





LAMPIRAN

PAREPARE



NAMA MAHASISWA : SARAH

NIM : 18.2900.005

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

JUDUL : EFEKTIVITAS PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA
DAERAH DI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
(ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Narasumber

1. Apakah penyusunan anggaran belanja di BAPPEDA sudah disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang?
2. Apakah anggaran belanja di BAPPEDA telah disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?
3. Bagaimana sistem penyusunan anggaran belanja daerah di BAPPEDA Kabupaten Enrekang?
4. Apakah penyusunan anggaran belanja daerah di Kabupaten Enrekang sesuai dengan manajemen keuangan syariah berdasarkan poin-poin berikut
 - Bersifat menegakkan keadilan
 - Amanah dan bertanggung jawab

- Komunikatif
5. Apakah penyusunan anggaran belanja daerah di BAPPEDA sudah dilaksanakan dengan tepat waktu?
 6. Bagaimana mekanisme atau tahapan dalam penyusunan anggaran belanja daerah di BAPPEDA Kabupaten Enrekang?
 7. Apakah penyusunan anggaran belanja daerah terbuka untuk publik?
 8. Apakah pada saat penyusunan anggaran belanja masyarakat juga di ikut dilibatkan dalam prosesnya?
 9. Apa saja bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran belanja daerah?
 10. Bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan syariah dalam melakukan penyusunan anggaran belanja daerah di BAPPEDA Kabupaten Enrekang?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian proposal skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 15 Maret 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.)

(Dr. Damirah, S.E, M.M.)

NIP. 19611231 199803 2 012

NIP.19760604 200604 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Nomor : 308/DPMPSTP/IP/VI/2022
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Enrekang, 03 Juni 2022
 Kepada
 Yth. Kepala BAPPEDA-LITBANG
 Kab. Enrekang
 Di-
 Enrekang

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor: B-2026/In.39.8/PP.00.9/05/2022 tanggal 31 Mei 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : *Sarah*
 Tempat Tanggal Lahir : Dante Malua, 25 Agustus 1999
 Instansi/Pekerjaan : Mahasiswi
 Alamat : Dante Malua Desa Ledan Kec. Buntu Batu

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **"Efektifitas Penyusunan Anggaran Belanja Daerah di BAPPEDA Kabupaten Enrekang (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)"**.

Dilaksanakan mulai, Tanggal 03 Juni 2022 s/d 03 Agustus 2022

Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG
 Kepala DP/1 PTSP Kab. Enrekang



Dr. Ir. CHAIDAR BULLU, ST., MT
 Pangkat Pembina Tk. I
 NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang.
03. Camat Enrekang.
04. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
05. Yang Bersangkutan (*Sarah*).
06. Pertinggal.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2026/In.39.8/PP.00.9/05/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI ENREKANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN ENREKANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SARAH
Tempat/ Tgl. Lahir : DANTE MALUA, 25 AGUSTUS 1999
NIM : 18.2900.005
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : DANTE MALUA DS LEDAN, KEL. LEDAN, KEC. BUNTU
BATU, KAB. ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN ENREKANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

EFEKTIFITAS PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DAERAH DI BAPPEDA KABUPATEN ENREKANG (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

31 Mei 2022

Dekan,



Muzdalifah Muhammadun



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Jenderal Sudirman Nomr 03 Enrekang, Telp.0420-21222

SURAT KETERANGAN

Nomor: : 050/75-a/VIII/2022

Dalam rangka penyusunan skripsi bagi mahasiswa tahap akhir penyelesaian studi di lingkup Institut Agama Islam Negeri Parepare, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Syamsuddin, S.Pt.M.Si
NIP : 19710115 2000031 007
Pangkat/Gol Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Badan

Menerangkan bahwa mahasiswa yang disebut namanya di bawah ini

Nama : Sarah
Nim : 18.2900.005
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Judul Penelitian : Efektivitas Penyusunan Anggaran Belanja Daerah di BAPPELITBANGDA (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)
Lokasi Penelitian : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah Kab. Enrekang

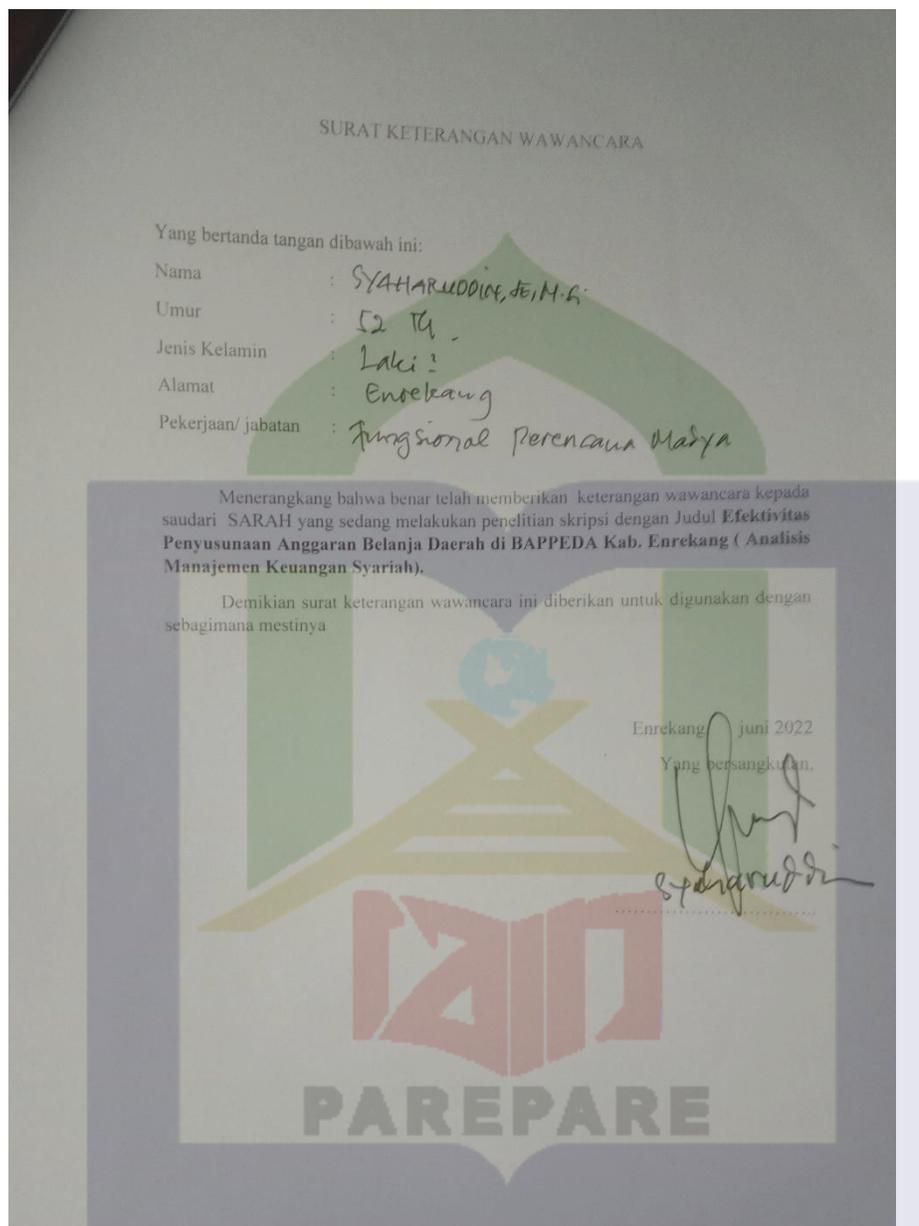
Sesuai dengan judul penelitian di atas, maka saya tidak merasa keberatan apabila mahasiswa yang bersangkutan melaksanakan penelitian selama 3 (tiga) bulan di instansi kami mulai pada tanggal 03 Juni 2022 s/d 03 Agustus 2022.

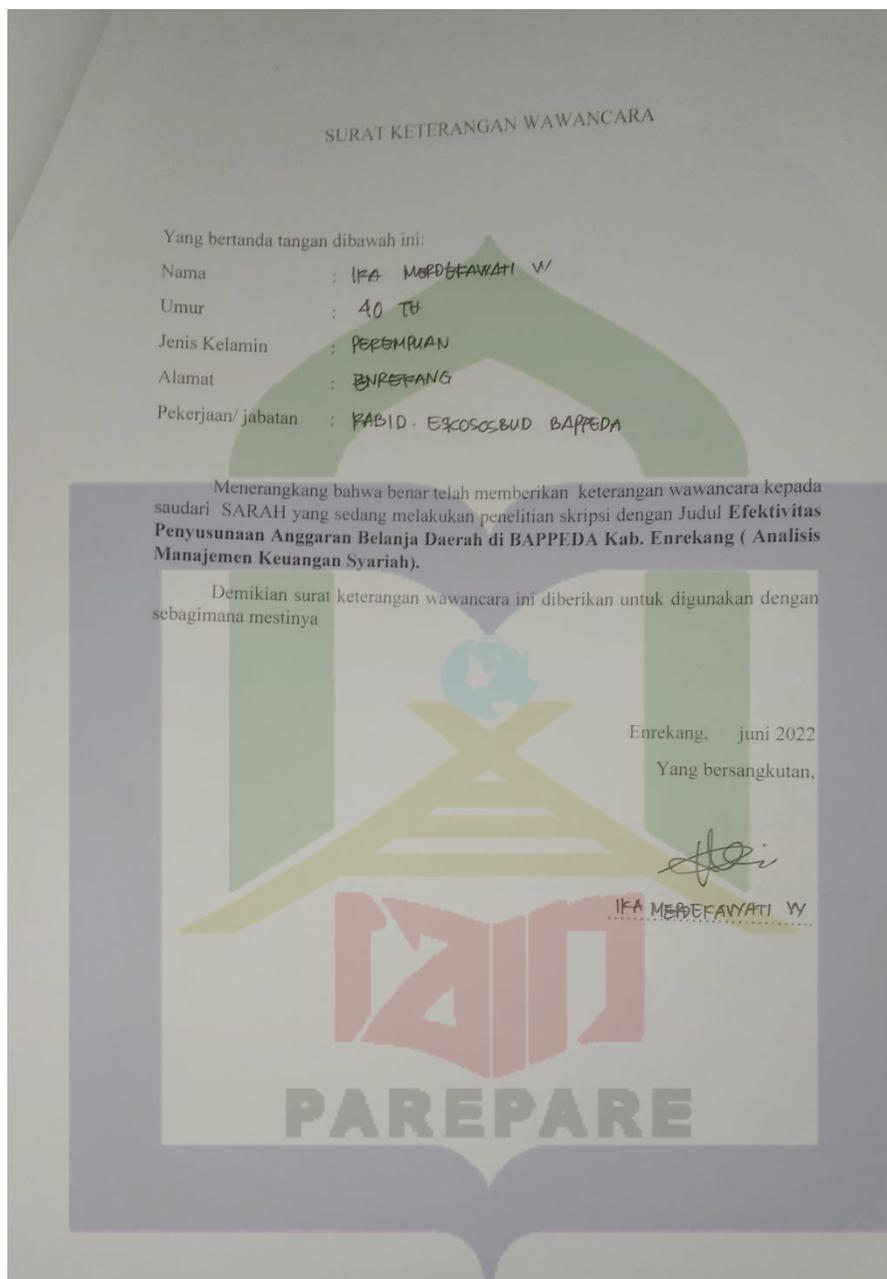
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih

Enrekang, 04 Agustus 2022

Kepala Badan,


Syamsuddin, S.Pt. M.Si
 Pangkat: Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP.19710115 2000031 007





SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

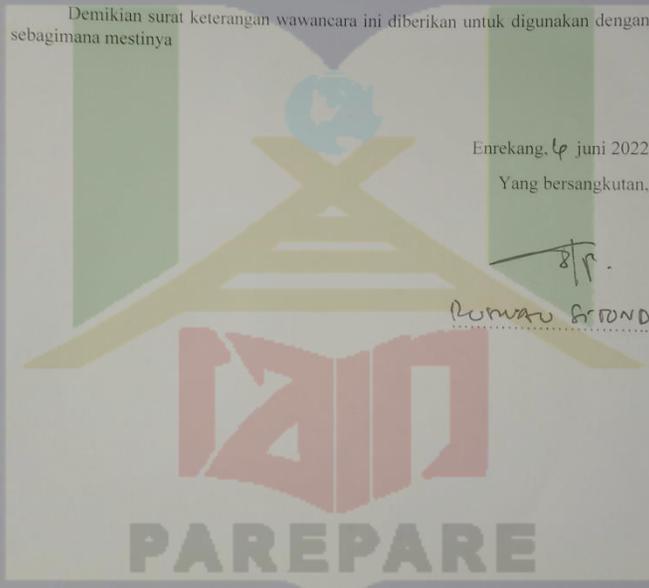
Nama : Purnama Ardana, SE
Umur : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Pria
Alamat : Enrekang
Pekerjaan/ jabatan : CAKUPAN MONET, CITRABEN dan
Kebudayaan Wara

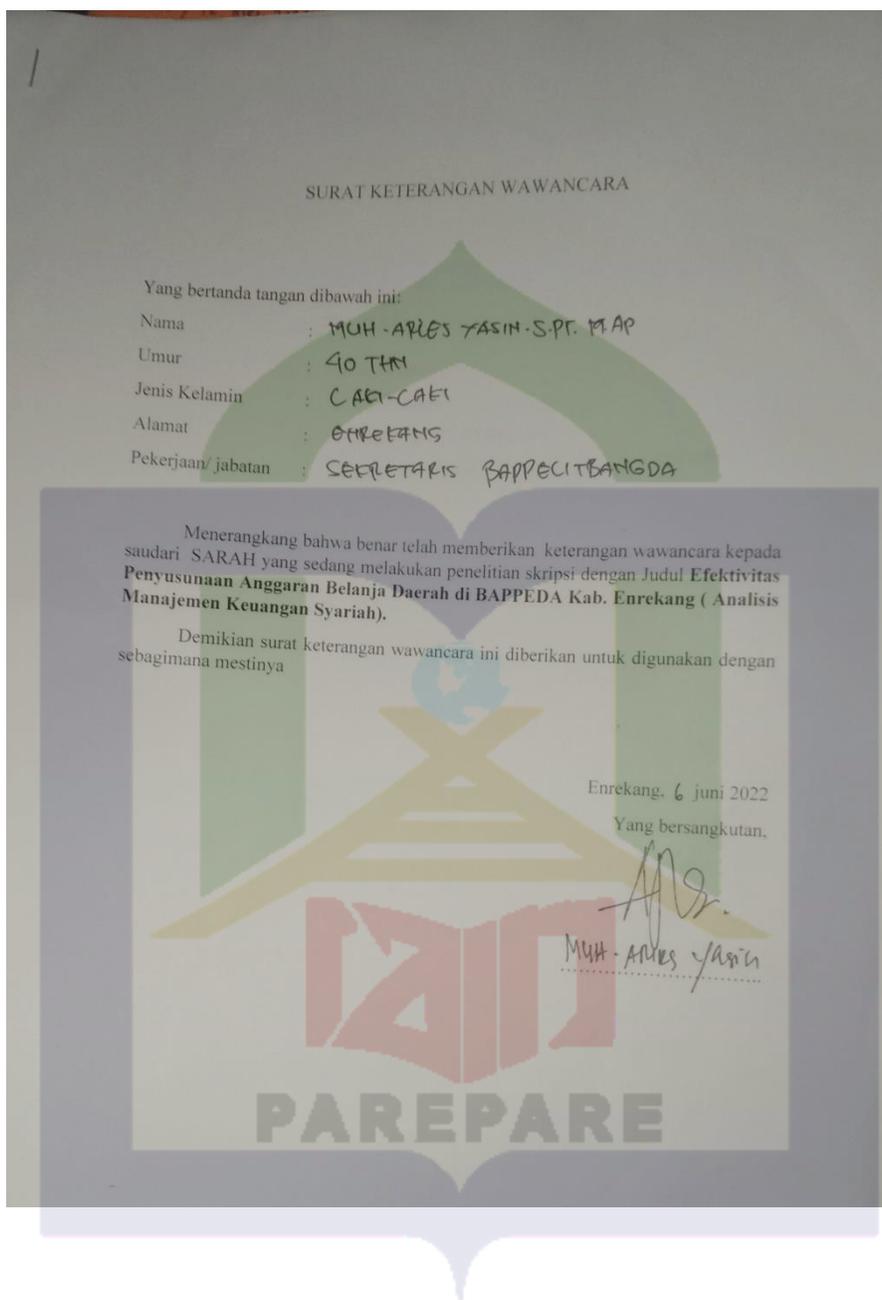
Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SARAH yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan Judul Efektivitas Penyusunan Anggaran Belanja Daerah di BAPPEDA Kab. Enrekang (Analisis Manajemen Keuangan Syariah).

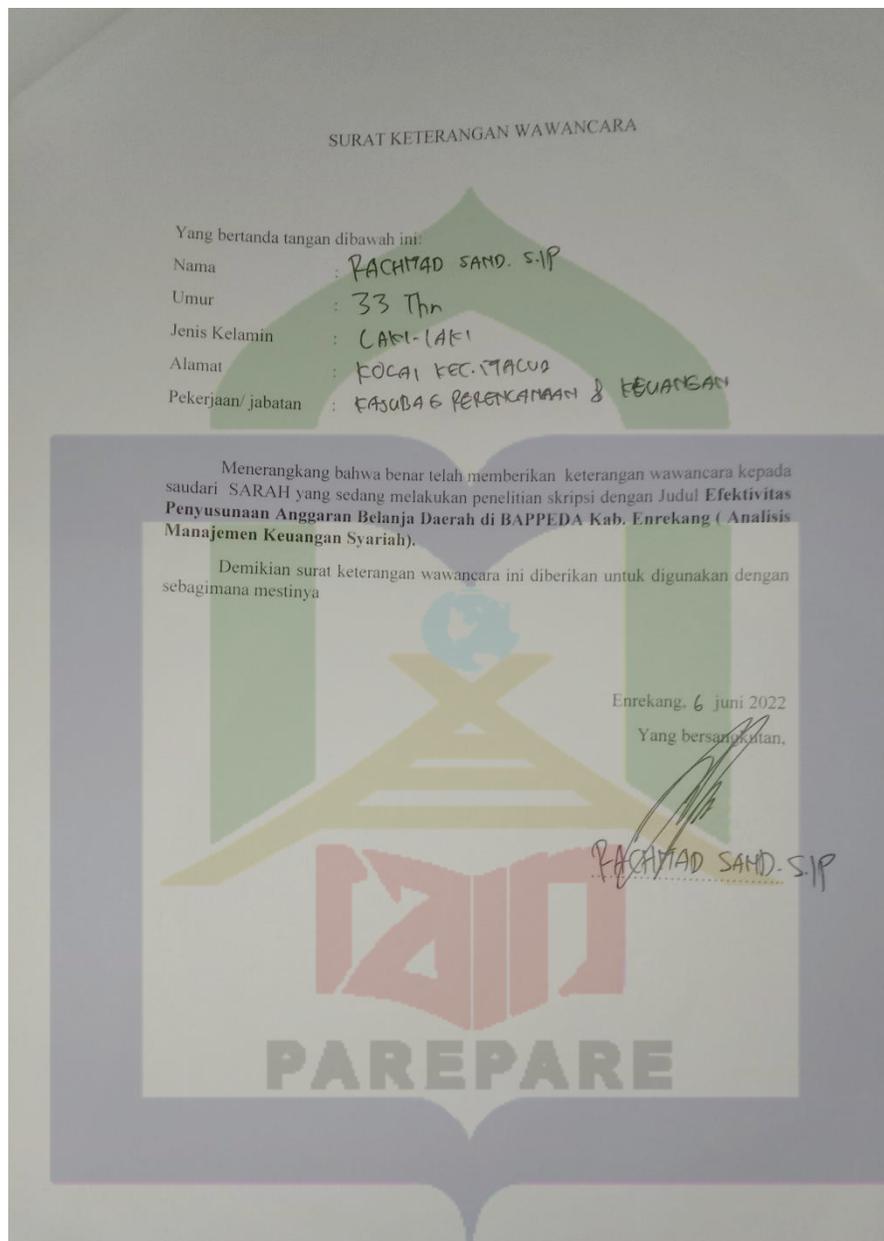
Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya

Enrekang, 4 juni 2022
Yang bersangkutan,

Purnama Ardana, SE







SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

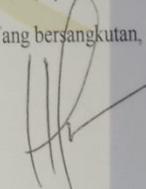
Nama : HENDRA, JE
Umur : 40 TAHUN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Alamat : ENREKANG
Pekerjaan/ jabatan : BENDAHARA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SARAH yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan Judul **Efektivitas Penyusunan Anggaran Belanja Daerah di BAPPEDA Kab. Enrekang (Analisis Manajemen Keuangan Syariah).**

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya

Enrekang, 22 / 7 / 2022

Yang bersangkutan,


..... HENDRA, JE

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Muh. Aries Yasin selaku Sekertaris BAPPEDALITBANG.



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Rachmad Sand selaku KASUBAG Perencanaan dan Keuangan



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Rusman Situnda selaku KABID Monev BAPPELITBANGDA Perencanaan Makro



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Ika Merdekawati W selaku KABID EKSOSBUD



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Syaharuddin selaku Fungsional Perencanaan Madya



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Hendra selaku Bendahara



RIWAYAT HIDUP



Penulis, SARAH Lahir pada tanggal 25 Agustus 1999, di Dante Malua, Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak pertama dari tiga bersaudara. Merupakan anak dari pasangan Jumadi dan Tia. Pernah menempuh pendidikan di TK Islam Bunga Durian pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 187 Dante Malua dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Baraka Enrekang dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu, melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 10 Enrekang dan lulus pada tahun 2018. Dan kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare dan mengambil Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian pada akhir semester penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Dusun Dante Malua, Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang. Setelah itu, penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Kerja (PPL) di Bank Mega KC. Parepare.